



PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2018**



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah daerah beserta pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 (Berita Acara Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006, Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Pemerintahan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan RKPD dilakukan berdasarkan :

- a. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,

rencana program dan kegiatan prioritas daerah maupun keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN.

Bab II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.

Bab III : KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN DAERAH.

Bab IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

Bab V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.

Bab VI : PENUTUP.

- (2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai :

- a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD Tahun 2018).
- b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan RAPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Dalam rangka menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4) huruf b Perubahan RKPD Tahun 2018 menjadi pedoman dalam :

- a. penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018.
- b. pembahasan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2018.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Juli 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



MASRADIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018
NOMOR : 24**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Adapun penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Rencana Program dan kegiatan RKPD berkenaan.
- b. Keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD

- b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD.
- c. Penetapan perubahan RKPD.

Penyusunan rancangan perubahan RKPD berpedoman pada:

- a. Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- b. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Sedangkan perumusan rancangan perubahan RKPD mencakup:

- a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah.
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan.
- c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah dan Daerah.
- d. Perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Suatu kebijakan menjadi relevan bagi suatu daerah (yang dengan demikian harus dipedomani) karena beberapa karakteristik:

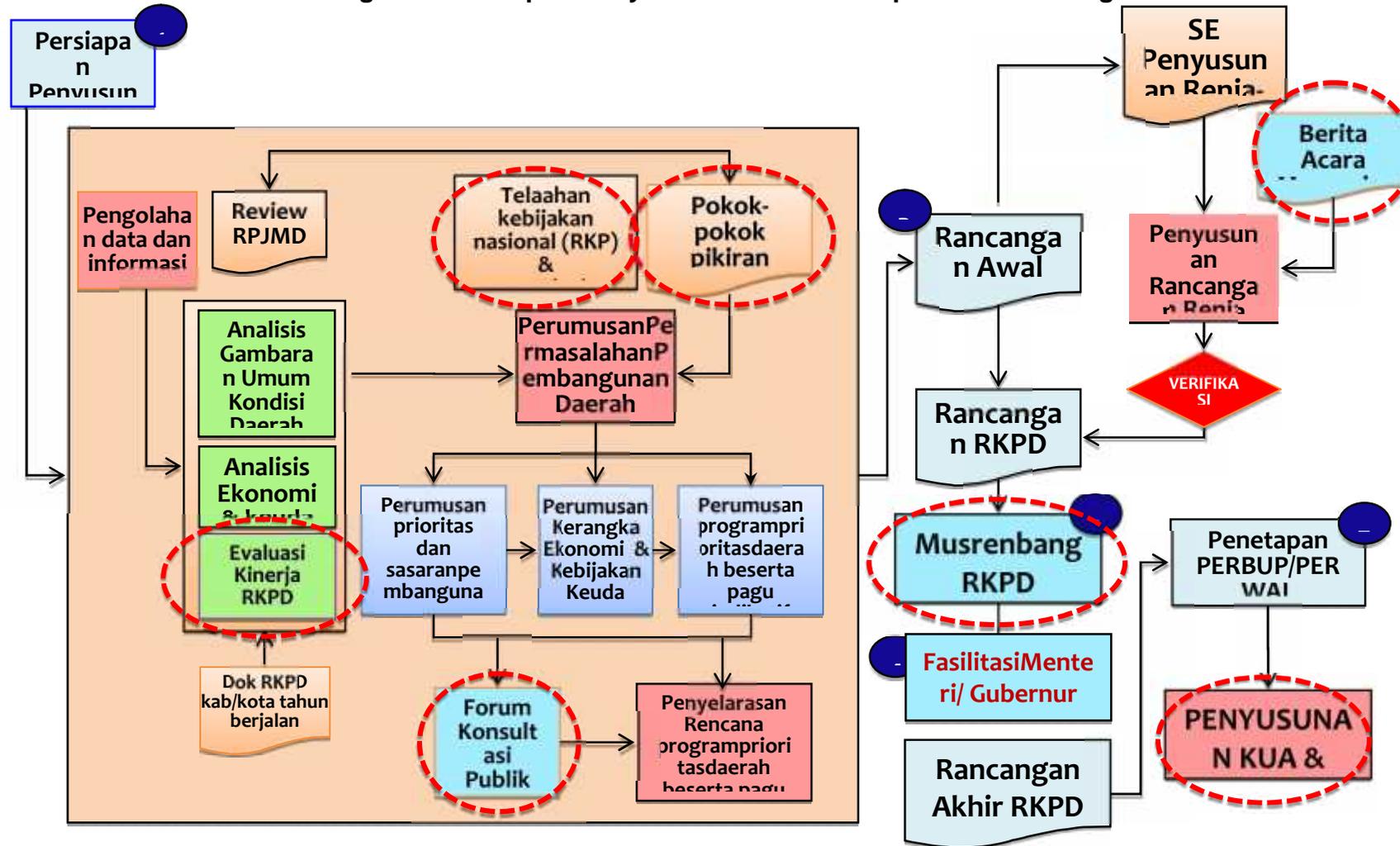
1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik:

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah,
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

Proses perumusan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 dapat dilihat sebagai managemen gambar bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1
 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 27. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 28. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor*,
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115).
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2017 Nomor 1);
39. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Barat; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, Rancangan awal RKPD Kabupaten yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten tersebut juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional dan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu sebagai berikut:

A. RPJM Nasional

RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pada tanggal 8 Januari 2015. Ada 3 (tiga) dokumen sebagai lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, yaitu: (i) Buku I dengan judul: "Agenda Pembangunan Nasional", (ii) Buku II dengan judul: "Agenda Pembangunan Bidang", dan (iii) Buku III dengan judul: "Agenda Pembangunan Wilayah". RPJM Nasional tersebut menjadi acuan penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program kewilayahan/regional.

B. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

RPJMD Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021. Tema RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah "Optimalisasi Pengelolaan Potensi Daerah melalui Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas antar Wilayah". Program prioritas Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 mengacu Visi dan Misi Gubernur terpilih adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Tata Ruang Wilayah,
2. Pemerataan Infrastruktur Wilayah,
3. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan, Pesisir dan Pantai,
4. Stabilitas Ekonomi Daerah,
5. Peningkatan Pendapatan Masyarakat,
6. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi,
7. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas,
8. Pengelolaan Industri Pariwisata,
9. Pengelolaan SDA Secara Bijaksana yang Berkelanjutan,
10. Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD.

C. RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat

Tema RKP Nasional pada Tahun 2019, yaitu "**Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas**", tema RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 adalah "**Percepatan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Penguasaan IPTEK dan Pembangunan Sarana**

Prasarana Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Perekonomian Berorientasi Potensi Unggulan Daerah”.

Adapun perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 merupakan penjabaran Visi: “Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas” dan Misi:

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan,
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga,
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dan dalam air tawar, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup,
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat,
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis,
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

D. RENJA – PD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan.

Perubahan renja-PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan tidak sesuai dengan asumsi Prioritas Pembangunan, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan RKPD berkenaan.
- b. Saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggara tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam penyajian dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan;
- c. Rencanakan kejadian pendanaan perangkat daerah; dan
- d. Penutup.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2018, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Perubahan Renja SKPD Tahun 2018, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2019,
2. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Perubahan RKPD 2018.
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya,
4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD,
5. Memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk :

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018,
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2018.

1.5.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1 Pengantar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi SKPD, maka urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu :

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan
6. Sosial.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi :

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olahraga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan.

C. Urusan Pilihan, meliputi :

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi.

D. Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

1. Administrasi Pemerintahan
2. Pengawasan
3. Perencanaan;
4. Keuangan;
5. Kepegawaian
6. Pendidikan dan pelatihan;

2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan SKPD

Belanja Langsung (BL) dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan berbagai urusan yang tertuang dalam program kegiatan pembangunan tahun anggaran 2018 sebesar Rp.721.330.828.000 dengan realisasi anggaran pada akhir Triwulan II sebesar Rp.200.484.857.886 atau 27,80% dan realisasi fisik sebesar 39,42 %.

Selengkapnya, berkenaan dengan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

2.2.1.1 Urusan Pendidikan

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 78.199.912.200 dan terealisasi sebesar Rp. 26.101.976.765 atau 33,38 % serta realisasi fisik sebesar 33,92 %. Adapun realisasi anggaran urusan pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pendidikan
Akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2018**

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Disdikbud	78.199.912.200	26.101.976.765	33,38	33,92				
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.981.154.200	462.801.776	16,33	49,81	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	86		%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.179.427.000	267.871.000	12,29	31,04	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	86		%
3	Program peningkatan disiplin aparatur	255.700.000	0	0,00	44,57	Tingkat Kepatuhan Aparatur	84		%
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	457.287.500	110.464.133	24,16	35,45	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	84		%
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	65.050.000	39.141.431	60,17	74,05	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90		%
6	Program pendidikan anak usia dini	1.954.001.500	98.756.000	5,05	11,21	Tersedianya Ruang kelas TK yang layak dan sesuai standar untuk anak-anak PAUD	1:20		
7	Program Pendidikan Sekolah Dasar	42.889.304.300	16.315.475.025	38,04	45,90	Terpenuhinya sarana prasarana sekolah	100		%
8.	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	22.974.828.500	8.208.969.600	35,73	41,93	Terpenuhinya sarana prasarana sekolah	100		%
9.	Program Pendidikan Non Formal	803.838.800	10.350.000	1,29	3,36	Terpenuhinya ruang belajar yang kondusif	100		%
10.	Program peningkatan mutu pendidik dan	4.215.560.400	564.450.300	13,39	22,46	Tercapainya guru yang profesional di bidangnya	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	tenaga kependidikan								
9	Program manajemen pelayanan pendidikan	423.760.000	23.697.500	5,59	9,31	Tercapainya kualitas dan kuantitas data dan informasi bidang pendidikan	100		%

2.2.1.2 Urusan Kesehatan

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat dan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Untuk alokasi anggaran urusan kesehatan tahun 2018 sebesar Rp.199.430.733.000 dan realisasi pada akhir Triwulan II sebesar Rp.68.334.936.765 atau 31,69% serta realisasi fisik sebesar 43,28 %.

Adapun realisasi anggaran urusan kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Realisasi Program Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
	DINAS KESEHATAN	74.842.245.000	15.996.374.980	21,37	41,52				
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	5.297.728.050	761.144.224	14,36	49,55	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	86		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.876.090.000	274.525.000	14,63	52,86	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	86		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	79.750.000	0	0	35,00	Tingkat Kepatuhan Aparatur	84		%
4.	Program fasilitas pindah/purn a tugas PNS	15.000.000	0	0	35,00	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	2		org

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja(Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	163.500.000	46.551.200	28,47	60	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangny	84		%
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	41.070.800	0	0	52,50	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90		%
7.	Program obat dan perbekalan kesehatan	5.586.332.000	1.578.717.130	28,26	38,33	Persentase Ketersediaan obat & Perbekalan Kesehatan di puskesmas	100		%
8.	Program upaya kesehatan masyarakat	17.674.050.400	4.520.568.343	25,57	40,83	Prosentase Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	100		%
9.	Program pengawasan obat dan makanan	415.618.600	18.621.350	4,48	40,00	Persentase Pelayanan Kefarmasian, makanan , Minuman dan Alat Kesehatan	50		%
10.	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	62.900.000	0	0	25	Jamu yang di minum masyarakat memenuhi standar kesehatan	60		%
11.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	516.154.900	64.469.021	12,49	30	Persentasi masyarakat memperoleh invormasi dan promosi Sadar Hidup Sehat melalui media Promosi	60		%
12.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	277.849.400	45.248.000	16,28	35	Terpenuhinya pemberian tambahan makanan dan vitamin yang efektif dan efisien guna perbaikan gizi masyarakat	18		puskesmas
13.	Program Pengembangan Lingkungan	3.451.882.400	121.366.600	3,51	38,33	Meningkatnya pengetahuan pengelola / pengusaha	80		Org

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja(Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
	Sehat					Depot Air Minum, Pengelola/Pengusaha Tempat Pengelolaan Makanan Meningkatnya pengetahuan siswa Sekolah Dasar tentang higiene sanitasi pangan anak sekolah	540		sisw a
14.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1.696.809.300	287.620.722	16,95	41,25	Persentase Menurunkan Angka kesakitan 100%	100		%
15.	Program standarisasi pelayanan kesehatan	1.758.126.450	425.489.640	24,2	40	Puskesmas telah menyelesaikan tahapan akreditasi dari tahapan implementasi ,pra assesment survei dan survei akreditasi untuk 3 puskesmas Puskesmas telah menyelesaikan tahapan pendampingan pasca survei Akreditasi	3 6		pus kes mas
16.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya	3.424.500.000	374.487.500	10,93	46,43	Termanfaatkan dan berfungsinya sarana kesehatan yang telah dibangun	100		%
17	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana	2.500.000.000	0	0	20	Jumlah Rumah sakit Pratama Tipe D yang akan di Bangun	1		rs

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja(Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
	rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata								
18.	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	16.005.409.600	3.564.057.577	22,26	45	Persentase Peningkatan Jaminan Kesehatan	100		%
19.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	89.573.900	0	0	30	Terlaksananya kegiatan LBI untuk balita yang sehat dan berkualitas	100		%
20.	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	76.860.000	0	0	30	Meningkatnya pemeliharaan kesehatan Lansia dan meningkatnya SDM kader Posbindu Lansia	100		%
21.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	3.491.183.000	438.627.973	12,56	40	Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir risiko tinggi	60		%
22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	565.104.000	128.491.600	22,73	73,33	Persentase Menurunkan Angka kesakitan	100		%
23	Program Pendayagunaan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.776.752.200	3.346.389.100	34,22	56,67	terpenuhinya jumlah dan jenis tenaga sesuai dengan standar	100		%

RSUD SULTAN IMANUDDIN		124.588.488.000	52.338.561.785	42,01	45,04				
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	324.100.000	93.122.879	28,73	57,08	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	86		%

2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	974.574.000	352.016.000	36,12	36,63	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	86		%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	140.800.000	126.515.000	89,85	100	Tingkat Kepatuhan Aparatur	84		%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	184.000.000	98.129.027	53,33	67,93	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	84		%
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	21.000.000	18.564.685	88,40	100	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90		%
6.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	37.149.014.000	10.297.285.300	27,71	28	Tersedianya Bangunan Baru, Tersedianya Dokumen perencanaan pengawasan di Rumah Sakit, dan Terpeliharanya Gedung RS	12		pkt
7.	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	430.000.000	37.280.738	8,66	10	Terlaksananya kemitraan pelayanan kesehatan pasien kurang mampu	100		%
8.	Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	85.365.000.000	41.315.648.156	48,40	52,54	Terlaksananya kegiatan untuk meningkatkan mutu pelayanan RSUD	100		%

2.2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terbagi dalam 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi serta 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu UPTD Alat Berat dan UPTD Laboratorium Konstruksi dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 223.509.350.000 dan terealisasi sebesar Rp. 49.216.292.455,90 atau 22,02% serta realisasi fisik sebesar 39,42 %. Adapun realisasi anggaran

program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum berikut kinerja output dan outcome dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2017(Akhir Triwulan II 2018)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
DINAS PUPR		223.509.350.000	49.216.292.455,90	22,02	39,42				
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	3.065.369.600	870.513.871	28,39	56	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	365.205.000,00	36.366.814	9,95	61	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	218.500.000	12.000.000	5,49	48,33	Tingkat kepatuhan aparatur	100		%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	228.000.000,00	116.036.635	50,89	50,89	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.380.000	0	0	0	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100		%
6.	Program pembangunan jalan dan jembatan	122.593.955.600	40.655.426.965	33,16	57,12	Persentase panjang ruas jalan terhubung pusat produksi terhadap total panjang jalan kabupaten	83		%
7.	Program Pembangunan dan Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong	6.733.487.584	199.375.000	2,96	3	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	77		%
8.	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	7.272.044.400	44.558.300	0,61	1,2	Persentase tingkat kondisi jalan dan jembatan kabupaten baik dan sedang	78		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
9.	Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	200.000.000	196.260.000	98,13	100	Cakupan informasi/ database jalan dan jembatan	6		Kec.
10.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1.365.500.000	381.532.800	27,94	19,55	Cakupan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan	100		%
11.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	14.765.816.600	2.075.764.200	14,05	15,45	Persentase tersedianya air irigasi untuk mendukung pertanian pada sistem irigasi sesuai dengan kewenangannya	33		%
13.	Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	4.832.051.800	595.005.400	12,31	12,5	Jumlah embung dan bangunan penampung air yang ditangani	5		embung
14.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	12.259.683.000	114.990.900	0,93	5,46	Jumlah penduduk terlayani air minum, Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK komunal/ SPAL terpusat	90		%
15.	Program pengendalian banjir	10.871.616.600	2.077.465.800	19,1	27,45	Persentase berkurangnya kawasan rawan banjir	16		%
16.	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	10.556.525.016	746.471.500	7,07	3,92	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh diperkotaan	77		%
17.	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	25.914.699.800	653.258.000	2,52	2,9	Panjang jalan lingkungan permukiman yang memenuhi Kondisi Jalan Baik dan sedang, Persentase rumah tangga	255 70		Km %

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						pengguna air bersih			
18.	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	898.340.000	157.692.490	17,55	48,62	Cakupan informasi penataan ruang, Tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang, Cakupan wilayah pengendalian pemanfaatan ruang	1 100 6		Kec. % Kec.
19.	Program Pembinaan Konstruksi	1.364.175.000	283.573.780	20,78	30,55	Persentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kab/kota pada SIPJAKI	60		%

2.2.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.896.090.000 dan realisasi pada akhir Triwulan II sebesar Rp.573.603.524 atau 39% serta realisasi fisik sebesar 56 %.

Adapun realisasi anggaran urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2018

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Disperkim	2.896.090.000	573.603.524	39	56				
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	763.740.000	216.555.654	28,35	38,20	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	62.150.000	31.384.000	50,49	53,54	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	53.000.000	29.450.000	55,57	63,68	Tingkat kepatuhan aparatur	100		%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	140.000.000	60.882.100	43,49	46	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30.330.000	21.251.770	70,07	98,91	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100		%
6.	Program Pengembangan Perumahan	705.820.000	59.921.500	8,49	47,57	Persentase Rasio Rumah Layak Huni	91		%
7.	Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	1.141.050.000	154.158.500	13,51	41,57	Persentase lingkungan kawasan pemukiman yang tertangani	30		%

2.2.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 4 SKPD yaitu : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.918.546.000 dan realisasi pada akhir Triwulan II sebesar Rp.3.074.373.497 atau 12% dengan realisasi fisik sebesar 29 %.

Adapun realisasi anggaran urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2018

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
Realisasi	(%)								
	Satpol PP dan Damkar	5.748.753.000	1.806.019.927	31,42	32,50				
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	990.078.000	318.933.045	32,21	33,12	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	985.260.000	89.630.000	9,10	9,36	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	121.500.000,0 0	0	0		Tingkat kepatuhan aparatur	100		%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	129.500.000	67.891.900	52,43	53,44	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	31.050.000,00	17.084.000	55,02	59,89	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100		%
6.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.884.525.000	1.196.560.98 2	41,48	41,48	Persentase anggota LINMAS yang mendapat pelatihan	100		%
7.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	8.400.000	0	0		Jumlah pengawasan dan pengendalian Kantrantibmas	95		%
8.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	91.955.000	24.160.000	26,27	26,27	Penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	95		%
9.	Program peningkatan kesiagaan dan	403.100.000	79.810.000	19,80	20,11	jumlah kecamatan yang	80		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	pengecahan bahaya kebakaran					mempunyai pos pemadam kebakaran			
10.	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	103.385.000	11.950.000	11,56	11,56	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang di tindaklanjut	95		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.339.721.000	614.017.646	26,24	38,36				
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	607.539.000	251.819.166	41,45	51,95	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	89.720.000	30.284.117	33,75	42,23	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	51.600.000	6.000.000	11,62	14,53	Tingkat kepatuhan aparatur	100		%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	112.300.000	54.906.933	48,89	63,20	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	35.052.000,00	13.126.630	37,45	37,45	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100		%
6.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	608.350.000	95.197.000	15,65	36,01	Partisipasi instansi vertikal (keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantramtibmas	100		%
7.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	358.090.000	95.363.800	26,63	35,28	Jumlah konflik yang bernuansa SARA	0		kas us
8.	Program kemitraan	101.190.000	0	0	22,68	Persentase kelompok etnis	85		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	pengembanganw awasan kebangsaan					dan agama yang tergabung forum-forum binaan kesbangpol			
9.	Program pendidikan politik masyarakat	240.905.000	47.175.000	19,58	24,23	Persentase peningkatan pemilih yang dibina pada pemilu	90		%
10.	Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan	134.975.000	20.145.000	14,92	18,96	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakata n yang terbina	90		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.606.642.000	643.185.924	3,87	39,96				
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	815.268.950	292.089.010	35,82	58,46	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	407.284.050	77.527.000	19,03	39,02	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	47.850.000	-	-	5,00	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	98.500.000	37.702.000	38,27	80,00	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	37.500.000	17.996.000	47,98	100,00	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100		%
6.	Program Tanggap	442.629.000	66.408.600	15,00	15,23	Prosentase Penanganan Kejadian	70		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Darurat					Bencana yang Responsif			
7.	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	408.137.000	127.245.314	31,17	42,49	Prosentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	24		%
8.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	129.600.000	24.218.000	18,68	19,46	Prosentase Dokumen Perencanaan Rehabilitasi	90		%
9.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	14.219.873.000	-	-	0,00	Prosentase Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang Responsif	85		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Sekretariat Daerah	223.430.000	11.150.000	4,99	6,85				
1.	Program Pembinaan Kemasyarakatan	223.430.000	11.150.000	4,99	6,85	Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dievaluasi	100		%

2.2.1.6 Urusan Sosial

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.637.024.000 dan terealisasi sebesar Rp. 646.068.517 atau 37,55%, sedangkan realisasi fisik sebesar . Adapun realisasi program urusan Sosial selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.6 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Sosial
Tahun Anggaran 2018(Akhir Triwulan II)**

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
Realisasi	(%)								
	Dinas Sosial	2.637.024.000	646.068.517	24,49	37,55				
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	627.384.000	306.552.917	48,86	61,27	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	118.080.000	5.749.500	4,87	20,11	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	32.250.000	6.000.000	18,60	23,26	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	103.500.000	59.071.300	57,07	71,43	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.859.200,00	12.723.000	51,18	91,76	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100		%
6.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	118.634.750,00	0	0	0	Persentase Fakir Miskin yang Dapat Meningkatkan Kemampuannya dalam memenuhi Kebutuhan Dasarnya	20		%
7.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	877.195.400	158.930.000	18,12	87,31	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	302		org
8.	Program pembinaan anak terlantar	69.410.000	6.315.000	9,10	10,18	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan	15		anak

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
						Anak Terlantar Yang Telah Dibina			
9.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	51.029.900	2.190.000	4,29	9,80	Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma Yang Diberikan Pelayanan dan Pembinaan	10		anak
10.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	324.070.000	11.680.000	3,60	6,41	Jumlah PSKS Yang Diberikan Peningkatan Potensi dan Sumber Daya Pembangunan Kesejahteraan Sosial	80		org
11.	Program perlindungan dan jaminan sosial	290.610.750,0 0	76.856.800	26,45	31,52	Prosentase PMKS Yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100		org

2.2.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

2.2.2.1 Urusan Tenaga Kerja

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasidengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.560.448.000dan terealisasi sebesar Rp. 943.938.236atau 26,51%, sedangkan realisasi fisik sebesar 38,11 %. Adapun realisasi anggaran urusan tenaga kerja selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2018(Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.560.448.000	943.938.236	26,51	38,11				

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	967.675.700	358.973.169	24,25	47,10	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	149.420.000	13.248.000	8,86	18,87	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	62.500.000	50.770.000	81,23	91,23	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4.	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	15.000.000,00	-	0	-	Tingkat Fasilitas pindah/purna tugas PNS.	100		%
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	108.000.000	24.526.400	29,34	32,71	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9.232.400	5.065.000	9,35	64,86	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100		%
7.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.538.281.500	369.450.867	16,3	34,02	Persentase peningkatan pelatihan dan sarana dan prasarana pendidikan keterampilan bagi pencari kerja serta terpilihnya sarana dan prasarana LLK	100		%
8.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	416.398.400	72.480.000	11,74	27,41	Persentase peningkatan informasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	100		%
9.	Program Perlindungan Pengembangan	293.940.000	49.424.800	16,33	26,81	Persentase penyelesaian perselisihan	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Lembaga Ketenagakerjaan					hubungan industrial dan perlindungan hukum bagi jaminan sosial bagi tenaga kerja			

2.2.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Usuran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.749.105.000 dan terealisasi sebesar Rp. 605.220.483 atau 22,02%, sedangkan realisasi fisik sebesar 50,77 %. Adapun realisasi anggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Dinas Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana	2.749.105.000	605.220.483	22,02	50,77				
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	845.632.500	197.881.683	23,40	50,89	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana	1.029.875.000	272.434.000	26,45	59,19	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	aparatur					Aparatur			
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	68.260.000	27.010.000	39,57	10,99	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	66.500.000	30.235.000	45,47	100	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	39.130.000	21.505.000	54,96	79,54	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100		%
6.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	24.042.500	-	-	50,00	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan para petugas pendampingan korban KDRT tentang upaya perlindungan perlindungan perempuan dan anak dalam tindak kekerasan	100		%
7.	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	106.881.000	24.556.000	22,98	39,94	Terwujudnya peran serta aktif organisasi perempuan dalam mencapai kesetaraan gender di setiap program pembangunan	100		%
8.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	421.984.000	31.598.800	7,49	50,00	Terwujudnya peran serta aktif organisasi perempuan dalam mencapai kesetaraan gender	100		%
9.	Program Pengemban	46.830.000	-	-	40,00	Terpenuhinya Indikator	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	gan Kabupaten Layak Anak					Kabuapten Layak Anak (Terbetuk Forum Anak Desa/Kelurah an)			
10.	Program Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak	99.970.000	-	-	27,13	Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan tersalurnya bakat dan minat anak- anak di Kotawaringin Barat	100		%

2.2.2.3 Urusan Pangan

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.645.853.000 dan terealisasi sebesar Rp. 513.221.439 atau 31,18%, sedangkan realisasi fisik sebesar 38,54 %. Adapun realisasi anggaran urusan Pangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pangan Tahun Anggaran 2018(Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Dinas Ketahanan Pangan	1.645.853.000	513.221.439	31,18	38,54				
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	550.028.500	243.829.862	44,33	45,12	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	135.925.000	53.520.000	39,37	47,70	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3.	Program peningkatan	48.200.000	6.000.000	12,45	43	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	disiplin aparatur								
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	134.500.000	63.876.607	47,49	71,42	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	31.470.000	23.567.690	74,89	97,35	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100		%
6.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perke bunan	139.905.000	17.127.000	12,24	14,35	Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	60		%
7.	Program Pengembangan Penganekaraga man Konsumsi dan Keamanan Pangan	293.273.300	25.861.380	8,82	16,85	Terpenuhinya AKE (Angka Kecukupan Energi)	2155		kcal/ka pita/har i
8.	Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	117.050.000	23.040.800	19,68	25,99	Persentase terlaksananya kegiatan Stabilitas Harga, Pasoka n dan Akses Pangan	25		%
9.	Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	195.501.200	56.398.100	28,85	37,81	Penurunan Kerawanan Pangan	1		%

2.2.2.4 Urusan Pertanahan

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sekretariat Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar

Rp. 2.326.131.000 dan terealisasi sebesar Rp. 91.417.070 atau 3,93%, sedangkan realisasi fisik sebesar 14,22 %. Adapun realisasi anggaran urusan Pangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2018(Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	260.731.000	81.600.400	31,30	32,33				
1.	Program Perencanaan, Penataan dan Pengendalian Penggunaan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman	260.731.000	81.600.400	31,30	32,33	Persentase bidang tanah yang ditata dalam penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah di perumahan dan kawasan permukiman	40		%
	Sekretariat Daerah	95.000.000	9.816.670	10,33	10,33				
2.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	95.000.000	9.816.670	10,33	0,33	Jumlah SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang revisi terbaru Penundaan Pemberian Izin Baru (PPIB) kawasan Hutan Primer dan Gambut	1		SK
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.970.400.000	0	0	0				
3.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.970.400.000	0	0	0	Jumlah Aset Tanah yang Diamankan	200		persil

2.2.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Usuran Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 15.814.865.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.222.469.808 atau 33,02%, sedangkan realisasi fisik sebesar 33,87%. Adapun realisasi anggaran urusan Lingkungan Hidup selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018(Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Dinas Lingkungan Hidup	15.814.865.000	5.222.469.808	33,02	33,87				
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	767.899.300	311.389.511	41		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	76.760.000	19.918.664	26		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	58.300.000	-	-		Tingkat Kepatuhan Aparatur	90		%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	127.000.000	32.870.000	26		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90		%
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.100.000	1.500.000	71		Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90		%
6.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	9.173.101.000	3.829.771.150	42		Cakupan kebijakan, ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Cakupan kelompok pengelola persampahan	44,78		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
						berbasis masyarakat.			
7.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	261.861.200	40.609.500	16		Cakupan kualitas air, udara dan tanah. Cakupan titik pengawasan terhadap penataan di bidang lingkungan (air, udara, tanah) dan pengelolaan limbah.	44,68		%
8.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	51.895.000	-	-		Cakupan perlindungan dan konservasi SDA	44,68		%
9.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	409.464.000	140.039.000	34		Cakupan pembuatan kampung organik, Cakupan pembuatan taman Keanekaragaman Hayati, Cakupan ketersediaan informasi SDA dan LH	44,68		%
10.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	55.260.000	-	-		Persentase peningkatan kualitas udara	44,68		%
11.	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	46.719.000	-	-		Cakupan pengendalian kebakaran hutan	44,68		%
12.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.421.840.500	826.191.983	34		Persentase pemenuhan penyediaan lahan RTH di kawasan perkotaan	9,20		%
13.	Program Pengawasan Penaatan Pemegang Perijinan Lingkungan Hidup	84.030.000	2.600.000	3		Cakupan pemenuhan penataan terhadap ketentuan perijinan lingkungan hidup	44,68		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
14.	Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	378.295.000	17.580.000	5		Cakupan lembaga pendidikan yang meraih Adiwiyata	44,68		%
15.	Program Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	23.050.000	-	-		Cakupan terselesaikannya kasus-kasus lingkungan hidup	44,68		%
16.	Penanaman pohon pada lahan di luar kawasan	1.877.290.000	-	-		Meningkatnya pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman pada lahan diluar kawasan	44,68		%

2.2.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.181.093.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.051.113.938 atau 48,19%, sedangkan realisasi fisik sebesar 51,39%. Adapun realisasi anggaran urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.181.093.000	1.051.113.938	48,19	51,39				
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.229.291.400	622.976.668	50,68	53,84	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	95.820.000	26.667.144	27,83	38,09	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	51.230.000	6.000.000	11,71	14,64	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	183.500.000	86.540.696	47,16	47,96	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	23.205.000	17.961.780	77,40	98,71	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100		%
6.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	598.046.600	290.967.650	48,65	55,13	Terciptanya penataan administrasi kependudukan yang tertib	100		%

2.2.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.417.787.100 dan terealisasi sebesar Rp. 788.527.083 atau 23,07 %, sedangkan realisasi fisik sebesar 48,90 %. Adapun realisasi anggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.417.787.100	788.527.083	23,07	48,90				

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	559.292.450	149.507.051	4,37	48,88	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	77.370.000	-		54,28	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	38.700.000	-		94,32	Tingkat Kepatuhan Aparatur	90		%
4.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	60.000.000	-		-	Tingkat Fasilitas pindah/purna tugas PNS.	90 3		% org
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	117.000.000	64.509.900	1,89	76,92	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90		%
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	23.350.000	17.133.000	0,50	85,65	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90		%
7.	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	548.353.100	123.783.526	3,62	31,55	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	76		%
8.	Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat, Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal	370.241.800	83.492.010	2,44	31,74	Persentase Lembaga Ekonomi Desa, UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal yang dibina	70		%
9.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.384.212.150	283.617.856	35,97	31,79	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan yang di bina	100		%
10.	Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi	239.267.600	66.483.740	1,95	33,85	Persentase Peningkatan Pemahaman tentang Sumberdaya Alam dan	70		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Tepat Guna					Teknologi Tepat Guna			

2.2.2.8 Urusan Komunikasi dan Informatika

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.658.412.500 dan terealisasi sebesar Rp. 756.635.080 atau 28,46%, sedangkan realisasi fisik sebesar 42,63%. Adapun realisasi anggaran urusan Komunikasi dan Informatika selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.233.763.000	691.094.451	30,94	45,71				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.067.551.100	328.849.502	30,80	34,38	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	103.040.000	99.318.000	96,39	100,00	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	60.300.000	6.000.000	9,95	12,44	Tingkat Kepatuhan Aparatur	90		%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	76.000.000	38.824.950	51,09	100,00	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90		%
5.	Program pengembangan infrastruktur, komunikasi dan	144.254.000	9.556.410	6,32	6,62	Cakupan Pengembangan Infrastruktur, Komunikasi dan Informatika	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	informatika								
6.	Program implementasi dan pengembangan E-Government	221.937.900	38.834.649	17,50	28,36	Cakupan Implementasi dan Pengembangan E-Government	100		%
7.	Program layanan penyediaan informasi publik pemerintah daerah	225.145.000	90.411.000	40,16	43,06	Cakupan layanan penyediaan informasi publik pemerintah daerah	100		%
8.	Program layanan penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah	335.535.000	79.299.940	23,63	40,84	Cakupan layanan penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Sekretariat Daerah	424.649.500	65.540.629	15,43	17,99				
1.	Program Penyebaran Informasi dan Dokumentasi	424.649.500	65.540.629	15,43	17,99	Tersussunnya data statistik sektoral yang akurat dan up to date	80		%

2.2.2.9 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.626.738.300 dan terealisasi sebesar Rp. 820.643.876 atau 31,24%, sedangkan realisasi fisik sebesar 63,47%. Adapun realisasi anggaran urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.626.738.300	820.643.876	31,24	63,47				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.512.425.300	480.578.476	31,78	38,74	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	114.533.000	-	-	73,96	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	146.650.000	6.000.000	4,09	80,06	Tingkat Kepatuhan Aparatur	90		%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	133.000.000	102.714.800	77,23	86,09	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90		%
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	46.500.000	17.180.000	36,95	100	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90		%
6.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	252.067.000	35.682.000	14,16	28,68	Meningkatnya Koperasi yang melaksanakan RAT	10		%
7.	Program Pengembangan Usaha Koperasi	188.560.000	1.425.000	0,76	8,41	Meningkatnya Kemampuan SDM, Akses Permodalan dan Pemasaran produk Koperasi	100		%
8.	Program Penumbuhan Wirausaha Baru	114.660.000	111.625.600	97,35	100	Tumbuhnya Wirausaha Baru	100		%
9.	Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro	118.343.000	65.438.000	55,30	55,30	Meningkatnya Kualitas SDM Pelaku Usaha Mikro	100		%

2.2.2.10 Urusan Penanaman Modal

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.602.774.000 dan terealisasi sebesar Rp. 368.859.066 atau 23,01 %, sedangkan realisasi fisik sebesar 37,17%. Adapun realisasi anggaran urusan Penanaman Modal selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
Realisasi	(%)								
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.514.224.000	354.353.642,36	23,40	33,59				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	690.518.000	210.166.607,36	30,44	18,39	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	45.340.000	-	-	0,76	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	48.640.000	6.000.000	12,34	0,50	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	192.320.000	74.876.185	38,93	3,62	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	45.936.000	27.454.150	59,77	3,00	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100		%
6.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	130.050.000	3.915.800	3,01	1,45	Ketertarikan investor beinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	75		%
7.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi	85.380.000	6.582.400	-	-	Meningkatnya Investasi dan terealisasinya investasi di	75		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Investasi					Kab. Kotawaringin Barat			
8.	Program optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan	223.855.000	18.741.500	-	5,25	Jumlah perizinan usaha, perizinan tertentu dan non perizinan yang diterbitkan	1.750		buah
9.	Program Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	52.185.000	6.617.000	12,68	0,62	Jumlah Perusahaan yang menyusun dan melaporkan LKPM	60		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Sekretariat Daerah	88.550.000	14.505.424	16,38	40,76				
1.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	88.550.000	14.505.424	16,38	40,76	Persentase jumlah kegiatan pendampingan yang diikuti dalam rangka peningkatan promosi dan kerjasama investasi	80		%

2.2.2.11 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.514.224.000 dan terealisasi sebesar Rp. 354.353.642,36 atau 23,40 %, sedangkan realisasi fisik sebesar 33,59%. Adapun realisasi anggaran urusan Kepemudaan dan Olahraga selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.998.086.000	392.262.968	7,85	45,60				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	541.764.700	149.251.473	27,55	38,25	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	72.268.800	0,00	0,00	0,00	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	40.700.000	19.800.000	48,65	98,65	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	109.250.000	39.021.055	35,72	79,41	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22.152.000	14.783.940	66,74	74,51	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90		%
6.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.421.400.500	150.152.500	10,56	23,10	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	100		%
7.	Program Pembinaan dan Pemasarakataan Olahraga	1.833.550.000	12.500.000	0,68	50,19	Terlaksananya Kegiatan POP PROV dan POR PROV	100		%
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	957.000.000	6.754.000	0,71	0,71	Prosentase peningkatan sarana prasarana olahraga	100		%

2.2.2.12 Urusan Statistik

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 44.615.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0%, sedangkan realisasi fisik sebesar 40,34%. Adapun realisasi anggaran urusan Komunikasi dan Informatika selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	44.615.000	0	0	40,34				
1.	Program pengemban gan data/inform asi/statistik daerah	44.615.000	0	0	40,34	Tersussunnya data statistik sektoral yang akurat dan up to date	80		%

2.2.2.13 Urusan Kebudayaan

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 10.560.909.800 dan terealisasi sebesar Rp. 3.765.399.750 atau 35,65%, sedangkan realisasi fisik sebesar 36,48 %. Adapun realisasi anggaran urusan Kebudayaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.490.850.803	1.247.427.000	22,72	27,30				
1.	Program Pengelolaa n Kekayaan Budaya	2.064.254.800	330.498.000	16,01	18,64	Pelestarian peninggalan sejarah dan kepurbakalaan	100		%
2.	Program Pengelolaa n Keragaman Budaya	3.426.596.000	916.929.000	26,76	35,97	Terfasilitasinya perkembangan keragaman budaya daerah	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Setda	5.070.059.000	2.517.972.750	49,66	53,65				
1.	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	1.722.369.800	178.624.800	10,37	10,40				
2.	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan	3.347.689.200	2.339.347.950	69,88	76,90				

2.2.2.14 Urusan Perpustakaan

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 10.560.909.800 dan terealisasi sebesar Rp. 3.765.399.750 atau 35,65%, sedangkan realisasi fisik sebesar 36,48 %. Adapun realisasi anggaran urusan Perpustakaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perpustakaan Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.644.228.000	583.247.463	35,47					
1.	Program Pelayanan	720.623.400	280.587.590	38,94					

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Administ rasi Perkantora n								
2.	Program peningkata n sarana dan prasarana aparatur	257.516.000	67.957.160	26,39					
3.	Program peningkata n disiplin aparatur	34.950.000	6.000.000	17,17					
4.	Program peningkata n kapasitas sumber daya aparatur	108.500.000	66.226.713	61,04					
5.	Program Pengemban gan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustaka an	522.638.600	162.476.000	31,09					

2.2.2.15 Urusan Kearsipan

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kearsipandilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 40.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 18.800.000 atau 47%, sedangkan realisasi fisik sebesar %. Adapun realisasi anggaran urusan Kearsipanselengkapannya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.21 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kearsipan
Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)**

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
Realisasi	(%)								
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40.000.000	18.800.000	47					
1.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	10.000.000	3.500.000	35		Persentase terpenuhinya sarana penyimpanan arsip daerah	100		%
2.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ar sip daerah	8.500.000	3.500.000	11,76		Persentase arsip desa/kelurahan yang di selamatkan dan dilestarikan	100		%
3.	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	10.600.000	6.000.000	56,60		Terlaksananya pemeliharaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	3		jenis
4.	Program pengelolaan arsip statis dan dinamis	10.900.000	5.800.000	53,21		Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pencipta arsip Aparat Desa/Keluraha n	100		%

2.2.3 URUSAN PILIHAN

2.2.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 10.813.947.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.448.931.631 atau 22,65 %, sedangkan realisasi fisik sebesar 50,04 %. Adapun realisasi anggaran urusan Kelautan dan Perikanan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Dinas Perikanan	10.813.947.000	2.448.931.631	22,65	50,04				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.311.552.200	473.993.205	36,14	46,41	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	656.755.000	83.025.000	12,64	35,00	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	72.600.000	0	0	0	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	96.000.000	48.058.900	50,06	62,40	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32.000.000	13.935.000	43,55	50,00	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90		%
6.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.938.812.100	1.457.750.289	37,01	60,77				
7.	Program Pengembangan Usaha Hasil Perikanan	1.980.110.700	224.166.700	11,32	54,82				
8.	Program Pengembangan Perikanan	2.726.117.000	148.002.537	5,43	41,52				

2.2.3.2 Urusan Pariwisata

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.514.224.000 dan terealisasi sebesar Rp. 354.353.642,36 atau 23,40 %, sedangkan realisasi fisik sebesar 33,59 %. Adapun realisasi anggaran urusan Pariwisata selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.23 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pariwisata
Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)**

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Dinas Pariwisata	8.117.031.000	1.516.165.771	18,68	57,13				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	848.170.370	292.395.166	34,47	52,93	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	120.440.400	3.158.454	2,62	66,20	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	47.760.000	6.000.000	12,56	100,00	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	129.500.000	56.489.800	43,62	52,82	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.000.000	19.221.000	80,09	100,00	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100		%
6.	Program Pengembang an Pemasaran Pariwisata	1.339.375.000	331.181.927	24,73	33,83	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	80		%
7.	Program Pengembang an Destinasi Pariwisata	3.741.169.100	653.599.760	17,47	76,50	Identifikasi obyek, percepatan pembangunan dan pemeliharaan obyek wisata	100		%
8.	Program Pengembang an Kemitraan	318.256.600	47.019.664	14,77	21,91	Meningkatnya kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata	100		%
9.	Program Pengembang	1.548.359.530	107.100.000	6,92	10,00	Meningkatnya pelaku usaha ekonomi kreatif	20		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	an Ekonomi Kreatif								

2.2.3.3 Urusan Pertanian

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 15.962.981.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.622.384.813 atau 22,69%, sedangkan realisasi fisik sebesar 34,11 %. Adapun realisasi anggaran urusan Pertanian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	11.383.654.000	2.422.106.294	21,28	30,69				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.079.234.250	818.767.331	39,38	53,04	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	113.536.550	-	-	-	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	167.200.000	-		-	Tingkat Kepatuhan Aparatur	90		%
4.	Program fasilitas pindah/purna tugas	120.000.000	-	-	-	Tingkat Fasilitasi pindah/purna tugas PNS.	100 6		% org

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	PNS								
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	196.000.000	71.191.287	36,32	40,51	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90		%
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	54.015.500	21.673.000	40,12	49,57	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90		%
7.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	184.719.750	79.111.370	42,83	48,15	umlah dokumen usulan dan termonitor serta terevaluasi	4		Dok.
8.	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	680.172.500	143.180.400	21,05	46,40	umlah tenaga penyuluh yang terpasilitasi	87		org
9.	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1.916.147.250	258.331.700	13,48	20,56	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan	28,46		Kw/Ha
10.	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	1.097.166.200	70.846.790	6,46	11,72	Meningkatnya produktivitas hortikultura	4		Ton/Ha
11.	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	1.218.480.000	835.510.350	68,57	80,56	Peningkatan produksi dan mutu tanaman perkebunan	100		%
12.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	3.556.982.000	123.494.066	3,47	17,82	Terpasilitasi kelambagaan petani	843		klpk

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Pertanian								

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.579.327.000	1.200.278.519	26,21	37,52				
1.	Program Pelayanan Administras i Perkantora n	916.333.950	301.250.283	32,88	38,04	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90		%
2.	Program peningkata n sarana dan prasarana aparatur	227.540.000	23.870.000	10,49	42,29	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90		%
3.	Program peningkata n disiplin aparatur	93.300.000	6.000.000	6,43	70,11	Tingkat Kepatuhan Aparatur	90		%
4.	Program peningkata n kapasitas sumber daya aparatur	104.500.000	77.037.325	73,72	87,08	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	20		%
5.	Program peningkata n pengemban gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	26.440.000	20.111.372	76,06	-	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
6.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	872.992.000	327.671.667	37,53	20,87	Persentase meningkatnya pelayanan keswan dan pencegahan penyakit menular pada hewan/ternak	90		%
7.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	937.827.000	298.834.030	31,86	42,44	Persentase peningkatan populasi dan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia	12		%
8.	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	465.794.000	79.577.200	17,08	25,97	Persentase peningkatan usaha bidang peternakan	10		%
9.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan	934.600.050	65.926.642	7,05	10,85	Persentase peningkatan prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan	10		%

2.2.3.4 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.810.857.000 dan terealisasi sebesar Rp. 39.778.196 atau 2,20%, sedangkan realisasi fisik sebesar 39,82 %. Adapun realisasi anggaran Energi dan Sumberdaya Mineral selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Sekretariat Daerah	1.810.857.000	39.778.196	2,20	39,82				

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
1.	Program Pembinaan dan Pengawasa n Bidang Pertamban gan	30.257.000	14.000.000	46,27	55,09	Persentase jumlah pengelolaan air permukaan sesuai dengan aturan perundang- undangan	100		%
2.	Program Pengawasa n dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	71.600.000	18.037.450	25,19	33,70	Persentase ketersediaan data inventarisasi wilayah penambangan rakyat tanpa ijin	100		%
3.	Program Pembinaan dan Pengemban gan Bidang Ketenagalis trikan	1.709.000.000	7.740.746	0,45	30,67	Persentase jumlah pemeliharaan dan pengadaan lampu PJU di 6 Kecamatan Kab. Kobar	40		%

2.2.3.5 Urusan Perdagangan

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.626.738.300 dan terealisasi sebesar Rp. 820.643.876 atau 31,24 %, sedangkan realisasi fisik sebesar 63,47 %. Adapun realisasi anggaran urusan Perdagangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.26 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perdagangan
Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)**

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
Realisasi	(%)								
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.422.276.700	1.246.623.400	19,41	24,29				
1.	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	737.287.000	2.280.000	0,31	2,98	Meningkatnya standarisasi, tertib ukur dan perlindungan konsumen	100		%
2.	Program Peningkatan dan Pengembang an Ekspor	139.445.000	134.925.000	96,76	100	Meningkat dan Berkembangny a Pemasaran Produk Ekspor Daerah	100		%
3.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	190.110.000	-	-	-	Meningkatnya Perdagangan dalam Negeri	100		%
4.	Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan	39.050.000	8.050.000	20,61	39,11	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu	8		%
5.	Program Pemberantas an Barang Kena Cukai Ilegal	117.925.000	-	-	-	Tercapainya program pemberantasa n barang kena cukai ilegal	100		%
6.	Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar	4.929.571.700	1.101.368.400	22,34	27,92	Meningkatnya Sarana Prasaran dan Pengelolaan Pasar Rakyat	18		%
7.	Program Sosialisasi	268.888.000	-	-		Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Ketentuan di Bidang Cukai					masyarakat tentang ketentuan bidang cukai			

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Setda	38.400.000	11.200.000	29,17	29,78				
1.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	38.400.000	11.200.000	29,17	29,78	Persentase jumlah pendistribusian BBM dan LPG tepat sasaran sesuai ketetapan pemerintah	100		%

2.2.3.6 Urusan Perindustrian

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 291.245.000 dan terealisasi sebesar Rp. 111.372.500 atau 38,24 %, sedangkan realisasi fisik sebesar 50,04 %. Adapun realisasi anggaran urusan Perindustrian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.27 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perindustrian Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil	291.245.000	111.372.500	38,24	50,09				

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	dan Menengah								
1.	Program Pengembang an Industri Kecil dan Menengah	156.270.000	86.607.000	55,42	61,84	Berkembangny a Industri kecil Menengah	100		%
2.	Program Pengembang an Sentra dan Klaster Industri	21.100.000	5.400.000	25,59	67,30	Meningkatnya industri potensial	100		%
3.	Proram Perlindungan HKI dan Standardisasi Industri	113.875.000	19.365.500	17,01	21,12	Meningkatnya Daya Saing Produk IKM	100		%

2.2.3.7 Urusan Transmigrasi

Realisasi Pelaksanaan Program

Usuran Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 479.750.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0%, sedangkan realisasi fisik sebesar 0%. Adapun realisasi anggaran urusan Transmigrasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Transmigrasi Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si	479.750.000	0	0	0				
1.	Program Pengembang an Wilayah Transmigrasi	479.750.000	0	0	0	Persentase tersusunnya dokumen Rencana Lokasi	80		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
						Transmigrasi yang baru			

2.2.4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

2.2.4.1 Administrasi Pemerintahan

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh 8 SKPD meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Pangkalan Lada, dan Kecamatan Pangkalan Bantengdengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 49.446.636.000 dan terealisasi sebesar Rp. 14.089.607.265 atau 28,49%, sedangkan realisasi fisik sebesar 42,84 %. Adapun realisasi anggaran urusan Transmigrasiselengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.29 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Sekretariat Daerah	28.277.185.000	7.762.804.493	27,45	34,09				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.842.368.760	4.723.730.894	36,78	43,77	Cakupan layanan administrasi perkantoran	97		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	10.842.495.000	1.727.684.587	15,93	35,77	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	378.250.000	60.000.000	15,86	15,86	Tingkat Kepatuhan Aparatur	90		%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	321.000.000	196.518.182	61,22	61,22	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	21		%
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	38.000.000	28.645.832	75,38	92,11	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100		%
6.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	2.074.587.240	684.468.938	32,99	36,86	Persentase pelayanan kedinasan KDH/ WKDH yang terlaksana baik	90		%
7.	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	96.300.200	11.202.518	11,63	12,41	Jumlah MoU yang disepakati	4		Dok.
8.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	473.913.800	93.921.460	19,82	27,06	Persentase produk hukum yang dapat diakses masyarakat	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
9.	Program Pembinaa n dan Pelayanan Hukum	387.700.000	62.446.934	16,11	35,74	Persentase permasalah an hukum tertangani	100		%
10.	Program Peningkat an Kesadaran dan Pemaham an Hak Asasi Manusia	68.400.000	-	-	3,26	Angka pelanggaran HAM	0		%
11.	Program Pembinaa n dan Pengemban gan Organisasi	260.812.000	54.983.600	21,08	21,08	Persentase SKPD yang memiliki SOP bidang administrasi dan pemerintahan	100		%
12.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	294.000.000	25.572.548	8,70	10,65	Persentase Jumlah kecamatan baru yang terbentuk	33		%
13.	Program Peningkat an Akuntabili tas Kinerja Aparatur dan Instanssi Pemerinta h	199.358.000	93.629.000	46,97	47,36	Persentase SKPD yang nilai SAKIPnya baik (B) hasil evaluasi Inspektorat (TIM) dari SKPD yang dievaluasi	60		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Sekretariat DPRD	10.924.750.00 0	3.243.899.94 9	29,69	36,27				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.419.770.000	1.076.828.52 8	31,49	50,00	Cakupan layanan administrasi perkantoran	97		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	430.650.000	103.895.225	24,13	33,33	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	222.930.000	190.630.000	85,51	87,00	Tingkat Kepatuhan Aparatur	90		%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	304.000.000	133.732.900	43,99	48,44	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	21		%
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	56.000.000	17.401.100	31,07	100,0 0	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100		%
6.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	6.153.900.000	1.609.412.19 6	26,15	22,10				

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Daerah								
7.	Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan	337.500.000	112.000.000	33,19	40,00				

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Kec. Arut Selatan	3.050.708.000	1.111.635.580,00	36,44	36,44				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.293.823.000	773.425.280,00	33,72	33,72	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	387.660.000	116.676.000,00	30,10	30,10	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	175.500.000	156.886.000,00	89,39	89,39	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	170.100.000	46.269.300,00	27,20	27,20	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	23.625.000	18.379.000,00	77,79	77,79	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Kec. Kotawaringin Lama	3.113.500.000	471.565.645	15,15	47,91				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.104.620.000	420.584.645	38,08	46,40	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.792.555.000	17.539.000	0,98	27,90	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	57.000.000	6.000.000	10,53	13,16	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	112.000.000	14.065.000	12,56	100,00	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	37.725.000	13.377.000	35,46	100,00	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100		%
6.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	9.600.000	-	-	-	Pemantauan Realisasi APBDes di Desa desa se Kecamatan Kotawaringin Lama	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Kec. Arut Utara	941.880.000	320.076.969	33,98	55,96				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	652.806.400	212.154.969	32,50	50,76	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	97.800.000	56.900.000	58,18	25,00	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	50.200.000	12.000.000	23,90	50,00	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	94.000.000	20.150.000	21,44	60,00	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	38.217.600	18.872.000	49,38	100,00	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100		%
6.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	8.856.000	-	-	50,00	Pemantauan Realisasi APBDes di Desa desa se Kecamatan Arut Utara	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Kec. Kumai	1.677.641.000	689.131.775	41,08	47,85				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.275.087.000	571.611.025	44,83	49,60	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100		%
2.	Program peningkatan sarana	225.874.000	29.200.000	44,83	16,47	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	dan prasarana aparatur								
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	46.680.000	12.000.000	12,93	32,13	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	86.000.000	62.867.750	25,71	88,89	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	22.500.000	13.453.000	73,10	100,00	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100		%
6.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	21.500.000	-	59,79	-	Pemantauan Realisasi APBDes di Desa desa se Kecamatan Kumai	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Kec. Pangkalan Lada	741.859.000	252.894.050	34,09	34,09				

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	510.177.500	184.282.879	36,12	36,12	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	78.438.200	10.107.400	12,89	12,89	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	26.250.000	13.750.000	52,38	52,38	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	95.000.000	35.317.061	37,18	37,18	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	23.823.300	9.436.710	39,61	39,61	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100		%
6.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	8.170.000	-	-	-	Pemantauan Realisasi APBDes di Desa desa se Kecamatan Pangkalan Lada	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Kec. Pangkalan Banteng	719.113.000	237.598.804	33,04	50,09				
1.	Program Pelayanan Administra si Perkantoran	491.615.600	162.959.304	33,15	48,48	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100		%
2.	Program peningkat an sarana dan prasarana aparatur	65.360.400	15.042.400	23,01	31,43	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100		%
3.	Program peningkat an disiplin aparatur	29.400.000	6.000.000	20,41	25,51	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4.	Program peningkat an kapasitas sumber daya aparatur	110.003.000	40.684.100	36,98	46,08	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program peningkat an pengemba ngan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	22.734.000	12.913.000	56,80	98,97	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100		%

2.2.4.2 Pengawasan

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.546.819.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.372.803.418 atau 38,71%, sedangkan realisasi fisik sebesar 38,71

%. Adapun realisasi anggaran urusan Pengawasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pengawasan Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
Realisasi	(%)								
	Inspektorat Kabupaten	3.546.819.000	1.372.803.418	38,71	38,71				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	572.379.300	235.096.641	41,07	41,07	Cakupan layanan administrasi perkantoran	97		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	451.983.000	194.743.625	43,09	43,09	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	62.700.000	6.000.000	9,57	9,57	Tingkat Kepatuhan Aparatur	90		%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	262.500.000	148.166.982	56,44	56,44	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	21		%
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	28.840.000	21.381.799	83,52	83,52	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
6.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.690.755.700	721.709.022	42,69	42,69	Tingkat capaian pembinaan dan pengawasan internal secara berkala	100		%
7.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	361.781.800	45.705.349	12,63	12,63	Persentase tercapainya pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM APIP	100		%
8.	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	115.879.200	-	-	-	Persentase terpenuhinya dokumen infrastruktur yang diperlukan dalam mencapai level 3	76		%

2.2.4.3 Perencanaan

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Perencanaandilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Sekretariat Daerah danBappeda dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.895.271.500dan terealisasi sebesar Rp. 1.679.559.869atau 24,36%, sedangkan realisasi fisik sebesar 33,63 %. Adapun realisasi anggaran urusan Pengawasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perencanaan Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
Realisasi	(%)								
	Sekretariat Daerah	1.643.201.500	550.849.776	33,52	37,83				
1.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintahan	199.358.000	93.629.000	46,97	47,36	Capaian kesepakatan tata batas wilayah antar Kabupaten	100		%
2.	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	73.000.000	11.412.126	15,63	19,29	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	100		%
3.	Program Penyusunan Kebijakan dan Administrasi Pembangunan	320.181.000	146.089.104	45,63	47,53	Persentase data dan informasi bidang administrasi pembangunan yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	100		%
4.	program pengembangan data/informasi bidang pengadaan	210.802.500	105.775.308	50,18	51,89				
5.	Program Peningkatan	839.860.000	193.944.238	23,09	23,09	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Layanan Pengadaa n Barang dan Jasa Pemerinta h					ULP			

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Bappeda	5.252.070.000	1.128.710.093	21,49	29,43				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.296.187.400	530.894.597	40,96	49,78	Cakupan layanan administrasi perkantoran	97		%
2.	Program peningkat an sarana dan prasarana aparatur	1.854.130.000	103.596.330	5,59	7,03	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90		%
3.	Program peningkat an disiplin aparatur	73.500.000	6.000.000	8,16	32,65	Tingkat Kepatuhan Aparatur	90		%
4.	Program Fasilitas Pindah/Pu rna Tugas Pns	20.000.000	-	-	-				
5.	Program peningkat an kapasitas sumber daya	158.500.000	34.434.500	21,73	21,73	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	21		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	aparatur								
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	23.370.000	15.039.300	64,35	99,87	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100		%
7.	Program Penelitian Dan Perencanaan Pembangunan	274.638.000	109.832.548	39,99	60,56	Persentase Hasil Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	80		%
8.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	100.500.000	50.223.801	49,97	61,93	Persentase Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang Dimanfaatkan Dalam Pengambilan Kebijakan	80		%
9.	Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Dan Lingkungan Hidup	143.545.000	31.183.450	21,72	58,35	Presentase Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana yang Dimanfaatkan Dalam Pengambilan Kebijakan	80		%
10.	Progran Pengendalian Dan Evaluasi Pembangu	612.349.600	205.591.902	33,57	37,20	Persentase pelaksanaa n pembangunan yang	80		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	nan Daerah					sesuai dengan rencana			
11.	Program Perencana an Sosial Dan Pemerinta han	695.350.000	41.913.665	6,03	17,98	Persentase Data dan Informasi Perencanaan Pembanguna n Sosial Budaya yang Dimanfaatka n Dalam Pengambilan Kebijakan	80		%

2.2.4.4 Keuangan

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Keuangandilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 14.220.545.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.334.017.087 atau 30,48%, sedangkan realisasi fisik sebesar 46,02 %. Adapun realisasi anggaran urusan Keuangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.32 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Keuangan Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Badan Pendapatan Daerah	5.427.168.000	1.086.459.627	20,02	27,55				
1.	Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran	1.074.924.000	242.535.809	22,56	46,03	Cakupan layanan administrasi perkantoran	80		%
2.	Program Peningkat an Sarana dan Prasarana	526.660.000	16.700.000	3,17	6,73	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	80		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Aparatur								
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	84.100.000	6.000.000	7,13	7,13	Tingkat Kepatuhan Aparatur	80		%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	225.294.000	107.638.650	47,78	47,78	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80		%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	41.240.000	25.597.000	62,07	97,24	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	80		%
6.	Program Ekstensifikasi Pajak Daerah	253.109.000	66.522.700	26,28	29,08	Proporsi kenaikan jumlah objek pajak	500		Obyek pajak
7.	Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pelayanan Keluhan Masyarakat	571.018.000	98.508.900	17,25	17,14	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	1100		Dok.
8.	Program intensifikasi sumber	1.392.333.000	462.121.200	33,19	39,93	Prosentase piutang pajak daerah tahun berjalan terhadap	300		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	sumber pendapata n asli daerah					realisasi pajak daerah			
9.	Program Peningkat an Penerimaan dan Pengemban gan Pengelola an Pendapata n Asli Daerah	1.258.490.000	60.835.368	4,83	7,13	Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah	18		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.793.377.000	3.247.557.46 0	36,93	36,93				
1.	Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran	2.748.546.300	1.253.456.37 2	45,60	45,60	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100		%
2.	Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur	661.350.000	435.993.353	65,92	65,92	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100		%
3.	Program Peningkat an Disiplin Aparatur	90.150.000	6.000.000	6,66	6,66	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	491.500.000	294.096.219	59,84	59,84	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	122.000.000	16.836.000	13,80	13,80	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100		%
6.	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4.679.830.700	1.241.175.516	26,52	26,52	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	100		%

2.2.4.5 Kepegawaian

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.400.103.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.472.701.595 atau 43,31%, sedangkan realisasi fisik sebesar 46,56 %. Adapun realisasi anggaran urusan Kepegawaian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.33 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kepegawaian
Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)**

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
Realisasi	(%)								
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3.400.103.000	1.472.701.595	43,31	46,56				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	930.071.000	450.999.973	48,49	47,16	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100		%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	308.100.000	114.928.000	37,30	22,66	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100		%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	72.515.000	6.000.000	-	55,00	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100.000.000	73.580.950	73,58	80,00	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	42.280.000	19.029.000	45,01	33,94	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100		%
6.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.947.137.000	808.163.672	41,51	40,60	Persentase ASN yang sesuai kompetensi	100		orang

2.2.4.6 Pendidikan dan Pelatihan

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pendidikan dan Pelatihat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.381.591.000 dan terealisasi sebesar Rp. 393.577.315 atau 28,49%, sedangkan realisasi fisik sebesar 35,83 %. Adapun realisasi anggaran urusan Pendidikan dan Pelatihat selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
Realisasi	(%)								
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.381.591.000	393.577.315	28,49	35,83				
1.	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1.381.591.000	393.577.315	28,49	35,83	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi	100		%

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1. Kinerja Perekonomian Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Secara riil, perekonomian Kabupaten Kotawaringin mengalami pergerakan yang dinamis dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2015-2017). Pada 2015 Kotawaringin Barat mengalami pertumbuhan sebesar 7,3%. Capaian pertumbuhan tersebut melemah sebesar 1,49% pada 2016 menjadi 5,81%. Pertumbuhan ekonomi kembali menguat pada 2017, dengan capaian sebesar 6,81%*. Dengan menggunakan pendekatan *trend* data PDRB atas dasar harga konstan (AHK) tahun dasar 2010, dengan menggunakan data series tahun 2012-2016, diperkirakan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2018 dan 2019 bergerak stabil di kisaran 6,83% - 6,84%** . Angka tersebut merupakan angka target pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 yang sudah dikoreksi atas dasar pertimbangan hasil perhitungan capaian riil selama periode 2012-2017 yang telah dikonsultasikan kepada BPS Kabupaten Kotawaringin Barat. Apabila dinilai secara nominal harga berlaku, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat diperkirakan menghasilkan produk barang dan jasa setara 18,22 trilyun rupiah pada 2018 dan 20,56 trilyun rupiah pada 2019.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kab.Kotawaringin Barat 2013-2018

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018 ^P	2019 ^P
Pertumbuhan Ekonomi	6,70%	6,99%	6,90%	7,32%	5,81%	6,81%	6,83%	6,84%

Sumber : BPS dan hasil analisis, 2018

* : angka sementara

^P : angka proyeksi Bappeda Kotawaringin Barat yang telah dikonsultasikan dengan BPS Kotawaringin Barat

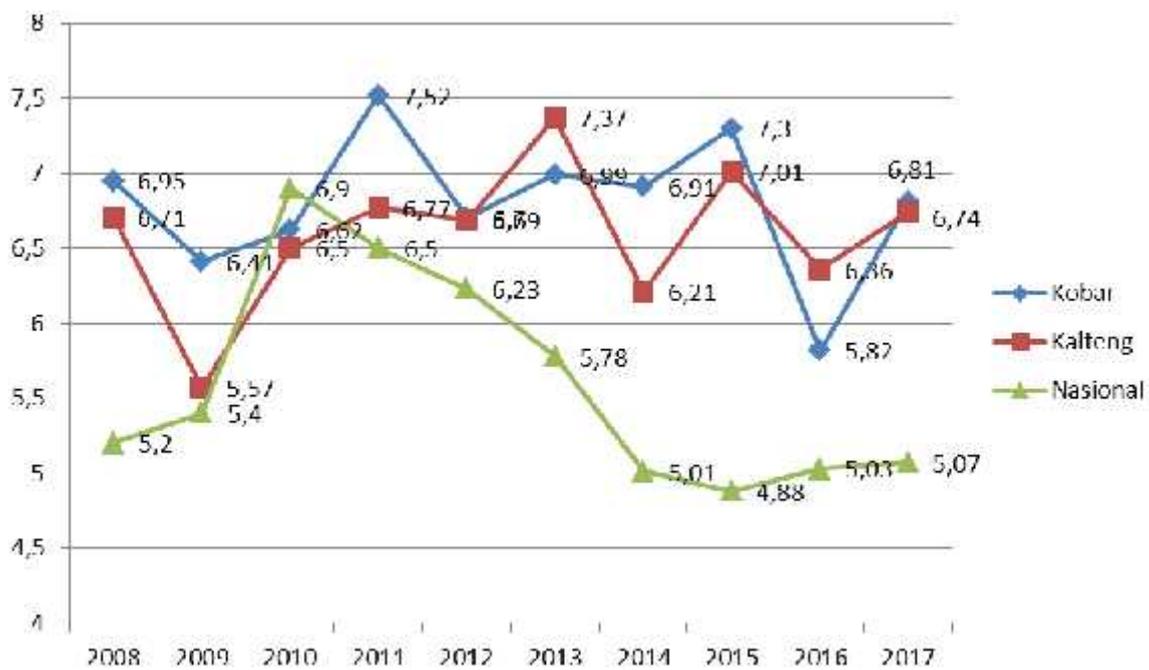
Gambar 3.1
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kobar 2011-2017



Sumber: BPS, dianalisis, 2018

Capaian pertumbuhan ekonomi Kotawaringin pada 2017 lebih tinggi dibandingkan capaian pertumbuhan nasional sebesar 5,07% dan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 6,74%. Dibandingkan dengan angka pertumbuhan nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kobar pada periode 2012-2017 menunjukkan kinerja yang lebih baik, yakni sebesar 6,75% dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah 6,73% dan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional 5,33%.

Gambar 3.2
Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional 2010-2017



Sumber: BPS, diolah, 2018

Kinerja perekonomian Kotawaringin Barat pada 2018 diperkirakan bergerak stabil, sebagai dampak dari kebijakan AS melakukan evaluasi *Generalized System of Preferences* (GSP) atau fasilitas bebas bea masuk, terhadap negara-negara mitra dagang AS yang memiliki neraca perdagangan surplus terhadap AS. Kebijakan tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi permintaan pasar terhadap komoditi ekspor Kobar, khususnya komoditi minyak nabati dan produk olahan kayu. Kondisi ini akan mempengaruhi kinerja ekspor Kobar, sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan.

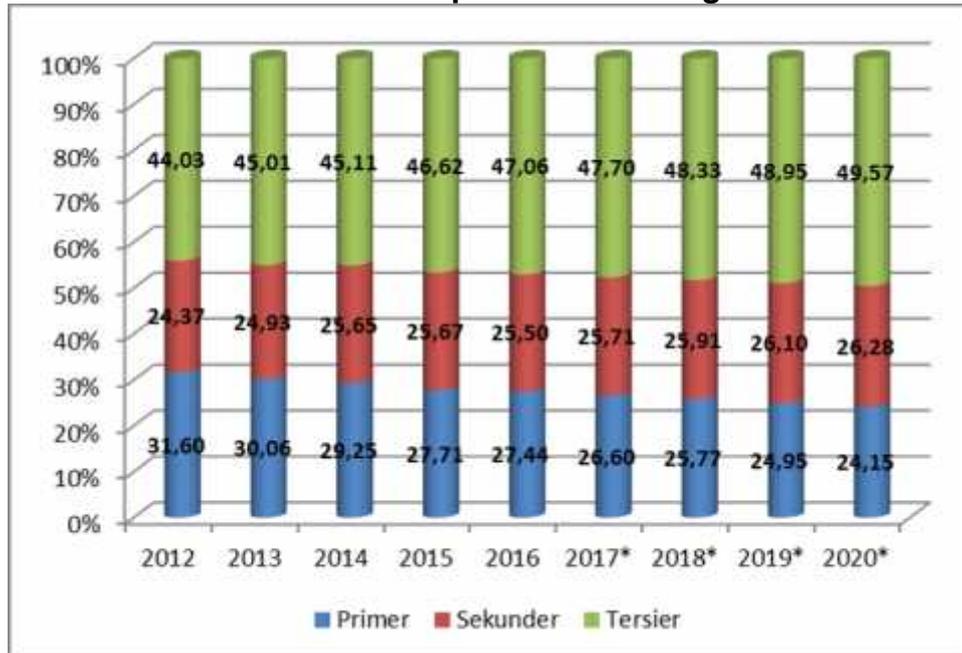
b. Struktur Ekonomi dan Distribusi Persentase Persektor

Pada tingkat sektoral, dengan pendekatan *trend* data PDRB AHK tahun dasar 2010, data series tahun 2012-2016, pertumbuhan ekonomi di tiap sektor pada 2017 memiliki angka pertumbuhan yang positif dan memiliki kinerja relatif membaik bila dibandingkan tahun 2016. Lebih dari 75% mencatatkan angka pertumbuhan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, antara lain sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 9,98%, sektor Real Estate 7,91% dan sektor Transportasi dan Pergudangan 8,23%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,26% dan sektor Industri Pengolahan 6,76%. Sedangkan sektor dengan tingkat pertumbuhan paling rendah di tahun 2017 adalah sektor Pertambangan dan Pengalihan sebesar 1,69% dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 5,34%.

Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (AHB), dapat diketahui distribusi persentase pembentukan PDRB di tahun 2017, di mana sektor yang memiliki peranan tertinggi dalam pembentukan PDRB tidak berubah dari pola tahun sebelumnya. Pembentukan PDRB masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan dengan proporsi sebesar 25,57%, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan proporsi sebesar 25,28%, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan proporsi 12,78%. Sementara sektor dengan kontribusi paling rendah terhadap PDRB adalah sektor Listrik; Gas dan Air Minum sebesar 0,05% dan sektor Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah; Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,09%.

Apabila distrukturkan berdasarkan PDRB AHB, pada periode 2012-2020, terlihat kecenderungan terjadi pergeseran proporsi. Secara perlahan, proporsi sektor primer semakin menurun, sementara sektor sekunder dan tersier semakin meningkat. Sektor primer bergeser menurun dari 31,6% pada 2012 menjadi 26,6% pada 2017, dan semakin turun menjadi 25,77% di tahun 2018 dan 24,95% di 2019. Sektor sekunder bergerak perlahan dari 24,37% di tahun 2012 meningkat menjadi 25,71% di tahun 2017, dan semakin meningkat menjadi 26,10% pada 2019. Sementara sektor tersier bergerak progresif dari 44,03% pada 2012 menjadi 47,70% pada 2017 dan 48,95% pada 2019. Kondisi ini memberikan gambaran kecenderungan pergeseran aktivitas ekonomi daerah dari aktivitas primer ke aktivitas sekunder dan tersier. Sebagaimana ciri wilayah yang maju, PDRB lebih didominasi oleh sektor sekunder utamanya sektor industri pengolahan, melihat kondisi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat maka sektor sekunder perlu diperbaiki dengan penguatan aktivitas hilir pada sektor primer, utamanya dengan membenahi sektor industri pengolahan. Langkah ini diharapkan memberikan efek domino, yakni meningkatkan nilai tambah bagi produk-produk sektor primer dan secara otomatis juga akan mendorong kinerja sektor tersier menjadi lebih baik.

Gambar 3.2
Struktur Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat 2010-2019



Sumber : BPS dan hasil analisis, 2017

Dikaitkan dengan peranan sektoral pada setiap struktur, masing-masing struktur diwakili oleh sektor dominan, yakni sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada struktur primer, sektor Industri Pengolahan pada sektor sekunder, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada sektor tersier. Dari ketiga sektor penyumbang terbesar PDRB tersebut diatas, dapat dilihat bahwa proporsi sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan semakin meningkat seiring penurunan proporsi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini karena produk dari sektor pertanian sudah mengalami prosesing lebih lanjut menjadi produk olahan/olahan setengah jadi, sehingga kontribusi PDRB sektor pengolahan industri dan sektor perdagangan di Kabupaten Kotawaringin Barat semakin meningkat dan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat semakin menurun. Penurunan proporsi pada sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan tersebut bukan semata-mata menunjukkan bahwa sektor pertanian mengalami penurunan, namun hanyalah pergeseran persentase/komposisi. Hal tersebut harus dibaca bahwa sektor ekonomilainnya juga mengalami pertumbuhan yang relatif baik sehingga menyebabkan peningkatan persentase/proporsi di sektor lainnya, inilah yang menyebabkan proporsi atau persentase sektor pertanian menjadi bergeser, sebab persentase akhir PDRB secara total adalah tetap 100%.

c. Dukungan Investasi untuk Mencapai Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi

Target pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang selalu ditetapkan dalam suatu periode perencanaan sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan pembangunan. Pada tahun perencanaan 2018, angka pertumbuhan ekonomi ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 adalah sebesar 7,48 %. Namun demikian, berdasarkan penghitungan trend capaian riil dari tahun 2012-2017 yang telah dikoordinasikan dengan BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, perkiraan angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 tumbuh pada angka 6,83%**. Untuk mencapai angka pertumbuhan tersebut, diperlukan peningkatan faktor-faktor produksi yang nantinya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat.

Salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan besaran modal atau lazim disebut investasi yang merupakan salah satu faktor produksi. Berdasarkan penghitungan nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2009-2013, diketahui bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat cukup kondusif untuk berinvestasi yang ditunjukkan dengan rendahnya angka ICOR akumulasi sebesar 1,52 yang berarti untuk mendapatkan 1 satuan output diperlukan input (investasi) sebesar 1,52 kali dari nilai output. Jika diimplementasikan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 6,83%**, maka pada 2018 dibutuhkan investasi sebesar Rp.27,8 trilyun.

Adapun arahan investasi ditujukan pada sektor-sektor sebagai berikut:

1. Dalam upaya pemerataan struktur ekonomi, investasi diarahkan ke sektor sekunder yaitu industri pengolahan, listrik, gas, air minum, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dikarenakan sektor ini masih kecil kontribusi PDRB-nya terhadap PDRB Total Kabupaten Kotawaringin Barat. Karena ciri wilayah yang maju adalah adanya hilirisasi kegiatan ekonomi dari primer ke sekunder dan tersier.
2. Dilihat dari sisi bisnis, maka investasi dapat diarahkan ke sektor tersier (jasa-jasa (0,04), keuangan, real estate dan jasa perusahaan (0,19)), sektor sekunder (industri pengolahan (0,6)) dan sektor primer (pertanian (0,3)) karena sektor ini memiliki angka ICOR paling kecil dibandingkan dengan sektor lainnya, artinya investasi pada sektor ini paling menguntungkan dibandingkan berinvestasi pada sektor lainnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Untuk dapat mengurangi tingkat pengangguran, investasi dapat diarahkan ke sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, yaitu: sektor Pertanian;

Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Tangga dan Hotel; Jasa Kemasyarakatan; Bangunan dan Industri Pengolahan. Investasi pada sektor-sektor tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan.

Tabel 3.2
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015 - 2019
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat (Rp. Juta)

NO	LAPANGAN USAHA	2015		2016		2017*		2018*		2019*	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.749.876,5	27,19	2.907.562,4	27,17	3.062.746,61	26,80	3.226.213,41	26,43	3.398.404,86	26,05
B	Pertambangan dan Penggalian	135.371,6	1,34	143.353,1	1,34	145.778,54	1,28	148.245,03	1,21	150.753,24	1,16
C	Industri Pengolahan	2.556.754,5	25,28	2.690.480,4	25,14	2.872.290,59	25,13	3.066.386,66	25,12	3.273.598,85	25,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.547,9	0,05	5.750,2	0,05	6.337,60	0,06	6.985,00	0,06	7.698,54	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.896,0	0,09	9.343,1	0,09	10.020,79	0,09	10.747,64	0,09	11.527,21	0,09
F	Konstruksi	885.898,2	8,76	934.460,2	8,73	1.006.053,51	8,80	1.083.131,92	8,87	1.166.115,66	8,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.232.135,6	12,18	1.319.377,5	12,33	1.415.221,90	12,38	1.518.028,78	12,43	1.628.303,93	12,48
H	Transportasi dan Pergudangan	836.753,3	8,27	884.708,5	8,27	957.541,56	8,38	1.036.370,57	8,49	1.121.689,11	8,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	128.405,8	1,27	139.756,1	1,31	151.825,03	1,33	164.936,21	1,35	179.179,62	1,37
J	Informasi dan Komunikasi	110.037,5	1,09	118.590,0	1,11	128.109,82	1,12	138.393,83	1,13	149.503,40	1,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	504.621,9	4,99	536.083,9	5,01	589.598,66	5,16	648.455,56	5,31	713.187,86	5,47
L	Real Estate	186.011,3	1,84	198.148,9	1,85	215.412,33	1,88	234.179,82	1,92	254.582,40	1,95
M,N	Jasa Perusahaan	4.666,2	0,05	4.859,7	0,05	5.234,56	0,05	5.638,34	0,05	6.073,26	0,05
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	312.953,4	3,09	331.239,2	3,10	357.447,09	3,13	385.728,57	3,16	416.247,71	3,19
P	Jasa Pendidikan	253.615,9	2,51	263.906,9	2,47	278.743,64	2,44	294.414,49	2,41	310.966,35	2,38

Q	JasaKesehatandanKegiatanSosial	110.859,1	1,10	115.724,4	1,08	123.118,29	1,08	130.984,60	1,07	139.353,50	1,07
RST U	JasaLainnya	90.308,9	0,89	96.593,3	0,90	103.032,64	0,90	109.901,26	0,90	117.227,76	0,90
JUMLAH TOTAL		10.112.713,6	100	10.699.937,8	100	11.428.513,18	100	12.208.741,68	100	13.044.413,26	100

Sumber : BPS dan hasil analisis, 2018

Keterangan : *) angka proyeksi

Tabel 3.3
Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2015 - 2019
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kotawaringin Barat (Rp. Juta)

NO	LAPANGAN USAHA	2015		2016		2017*		2018*		2019*	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.453.449,6	26,35	3.775.183,9	26,06	4.113.825,82	25,28	4.482.844,63	24,51	4.884.965,21	23,75
B	Pertambangan dan Penggalian	178.541,2	1,36	199.976,1	1,38	214.565,66	1,32	230.219,63	1,26	247.015,66	1,20
C	Industri Pengolahan	3.345.999,4	25,53	3.674.222,6	25,36	4.161.506,54	25,57	4.713.415,22	25,77	5.338.519,30	25,96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.437,0	0,05	6.854,6	0,05	8.014,14	0,05	9.369,83	0,05	10.954,85	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.492,4	0,09	12.468,1	0,09	14.112,90	0,09	15.974,69	0,09	18.082,08	0,09
F	Konstruksi	1.103.333,4	8,42	1.228.807,5	8,48	1.388.231,64	8,53	1.568.339,28	8,57	1.771.813,90	8,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.644.760,6	12,55	1.835.617,6	12,67	2.079.622,90	12,78	2.356.063,38	12,88	2.669.250,59	12,98
H	Transportasi dan Pergudangan	1.092.337,1	8,33	1.217.972,1	8,41	1.397.452,93	8,59	1.603.382,11	8,77	1.839.657,10	8,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	171.901,2	1,31	200.246,8	1,38	229.997,11	1,41	264.167,36	1,44	303.414,23	1,48
J	Informasi dan Komunikasi	128.076,0	0,98	139.983,4	0,97	156.110,93	0,96	174.096,52	0,95	194.154,23	0,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	693.110,0	5,29	761.271,0	5,26	887.968,59	5,46	1.035.752,35	5,66	1.208.131,61	5,87
L	Real Estate	240.223,9	1,83	272.923,3	1,88	310.705,04	1,91	353.717,03	1,93	402.683,33	1,96
M,N	Jasa Perusahaan	6.432,2	0,05	6.939,1	0,05	7.945,59	0,05	9.098,07	0,05	10.417,72	0,05
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	419.649,9	3,20	470.965,6	3,25	536.751,59	3,30	611.726,77	3,34	697.174,74	3,39

P	JasaPendidikan	339.955,8	2,59	375.290,8	2,59	418.225,50	2,57	466.072,09	2,55	519.392,51	2,53
Q	JasaKesehatandanKegiatanSosial	148.270,3	1,15	166.715,1	1,15	188.624,66	1,16	213.413,56	1,17	241.460,19	1,17
RST U	JasaLainnya	122.369,4	0,93	140.483,2	0,97	160.462,95	0,99	183.284,25	1,0	209.351,23	1,02
JUMLAH TOTAL		13.106.339,4	100	14.485.921,0	100	16.274.124,48	100	18.290.936,77	100	20.566.438,47	100

Sumber : BPS dan hasil analisis, 2018

Keterangan : *) angka proyeksi

Tabel 3.4
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015 - 2019
Atas Dasar Harga Berlaku (AHB) dan Harga Konstan (AHK)
Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	Sektor	2015		2016		2017*		2018*		2019*	
		AHB (%)	AHK (%)								
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	26,35	27,19	26,06	27,17	25,28	26,80	24,51	26,43	23,75	26,05
B	Pertambangan dan Penggalian	1,36	1,34	1,38	1,34	1,32	1,28	1,26	1,21	1,20	1,16
C	Industri Pengolahan	25,53	25,28	25,36	25,14	25,57	25,13	25,77	25,12	25,96	25,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
F	Konstruksi	8,42	8,76	8,48	8,73	8,53	8,80	8,57	8,87	8,62	8,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,55	12,18	12,67	12,33	12,78	12,38	12,88	12,43	12,98	12,48
H	Transportasi dan Pergudangan	8,33	8,27	8,41	8,27	8,59	8,38	8,77	8,49	8,94	8,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,31	1,27	1,38	1,31	1,41	1,33	1,44	1,35	1,48	1,37
J	Informasi dan Komunikasi	0,98	1,09	0,97	1,11	0,96	1,12	0,95	1,13	0,94	1,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,29	4,99	5,26	5,01	5,46	5,16	5,66	5,31	5,87	5,47
L	Real Estate	1,83	1,84	1,88	1,85	1,91	1,88	1,93	1,92	1,96	1,95
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,20	3,09	3,25	3,10	3,30	3,13	3,34	3,16	3,39	3,19
P	Jasa Pendidikan	2,59	2,51	2,59	2,47	2,57	2,44	2,55	2,41	2,53	2,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,15	1,10	1,15	1,08	1,16	1,08	1,17	1,07	1,17	1,07
RSTU	Jasa Lainnya	0,93	0,89	0,97	0,90	0,99	0,90	1,0	0,90	1,02	0,90
	JUMLAH TOTAL	100									

Sumber : BPS dan hasil analisis, 2018

Keterangan : *) angka proyeksi

Tabel 3.5
Rata-rata Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (AHB) dan
Atas Dasar Harga Konstan (AHK) Tahun 2015- 2019
Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	Sektor	Rata-rata	
		AHB (%)	AHK (%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25,19	25,91
B	Pertambangan dan Penggalian	1,3	1,27
C	Industri Pengolahan	25,63	25,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09
F	Konstruksi	8,52	8,7
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,77	12,56
H	Transportasi dan Pergudangan	8,60	8,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,40	1,37
J	Informasi dan Komunikasi	0,96	1,046
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,50	5,35
L	Real Estate	1,90	1,90
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,29	3,21
P	Jasa Pendidikan	2,56	2,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,16	1,11
RSTU	Jasa Lainnya	0,98	0,94
	JUMLAH TOTAL	100	100

Sumber : BPS dan hasil analisis, 2017

Tabel 3.6
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Kotawaringin Barat 2015-2019

No	Indikator Makro Ekonomi	Satuan	Realisasi		Bertambah/ Berkurang	Proyeksi		
			2015	2016		2017*	2018*	2019*
1	2	3	4	5	6	8	9	9
1.	PDRB Harga Berlaku (dalam juta)	Rp	13.106.339,4	14.485.920,8	1.379.581,40	16.274.124,48*	18.290.936,77*	20.566.438,47*
2.	PDRB Harga Konstan (dalam juta)	Rp	10.112.713,6	10.699.937,8	587.224,20	11.428.513,18*	12.208.741,68*	13.044.413,26*
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Berlaku tahun tertentu	%	11,23	10,53	-0,70	12,34*	12,39*	12,44*
4.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Konstan tahun tertentu	%	7,23	5,81	-1,42	6,81*	6,83*	6,84
5.	Tingkat Inflasi	%	4,06	4,08	0,02	3,61	n/a	n/a
6.	Angka Kemiskinan	%	5,04	4,92	-0,12	n/a	4,96**	4,72**
7.	Tingkat Pengangguran	%	2,66	3,25	0,59	3,04**	2,93**	2,82**
8.	PDRB perkapita (AHB) (juta)	Rp	47,12	50,52	3,40	54,91*	59,68*	64,87*

Sumber : BPS dan hasil analisis 2017, RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2012 -2016, Rantek RPJMD Kobar 2017-2022

Catatan:

* Angka PDRB AHK dan AHB, Pertumbuhan Ekonomi AHK dan AHB, serta PDRB perkapita AHB 2017, 2018, 2019 adalah angka proyeksi

** Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran 2017, 2018, 2019 diambil dari Target RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022

d. Laju Inflasi

Laju inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan kecenderungan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Angka inflasi *year on year* (YoY) tahun 2017 sebesar 3,61%, lebih rendah dibandingkan angka tahun sebelumnya sebesar 4,08% di tahun 2016. Sedangkan jika dilihat angka inflasi *year to date* (YtD), angka inflasi pada 2017 justru lebih tinggi bila dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 4,11% di tahun 2017 dibandingkan 3,58% pada 2016. Meskipun demikian, angka inflasi ini masih terbilang terkendali karena angka inflasi masih di bawah dua digit. Berdasarkan inflasi bulanan, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 0,93% dengan komoditi pemicu cabe rawit, kacang panjang, wortel, tarif listrik dan besi beton. Sementara inflasi terendah pada September 2017 dengan komoditi pemicu deflasi berupa jeruk, petai, terong, tomat sayur dan ayam ras. Pada tahun berjalan (2018), angka inflasi *year to date* (YtD) Januari sampai Juni 2018 sebesar 3,5%, dengan angka inflasi tertinggi pada bulan Juni 2018 sebesar 1,24% dan inflasi terendah pada Februari 2018 sebesar 0,06%, dengan komoditi pemicu inflasi yang utama adalah daging ayam ras.

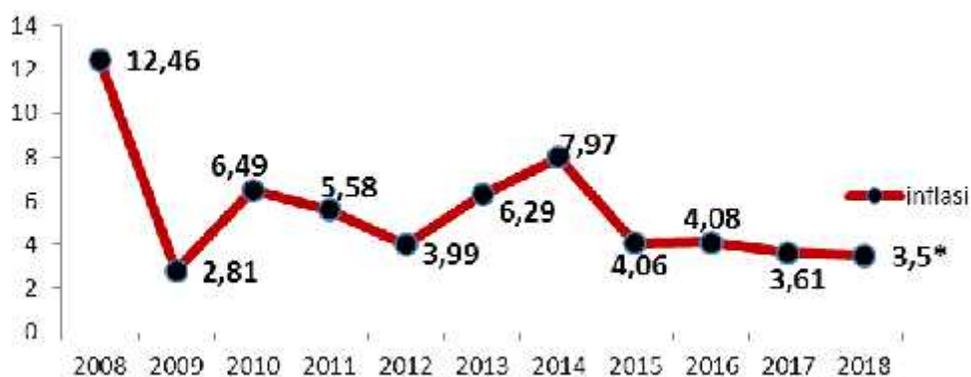
**Tabel 3.7. Nilai Inflasi Tahun 2011 – 2018*
Kabupaten Kotawaringin Barat**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Tingkat Inflasi	3,99 %	6,29%	7,97%	4,06%	4,08 %	3,61 %	3,5 %

Sumber : BPS, 2018

*) Angka Inflasi Year to date Januari s.d Juni 2018

**Gambar 3.3
Perkembangan Inflasi Pangkalan Bun 2008-2018***



Sumber: BPS, dianalisis, 2018

*) Angka realisasi inflasi Year to Date (Ytd) Januari-Juni 2018

Angka inflasi Kotawaringin Barat pada 2017 samadenganangkainflasi nasionalyaknisebesar3,61%. Angkainimasih lebih tinggijika dibandingkandenganinflasiyear on year Provinsi Kalimantan Tengahuntuktahun 2017yaitusebesar3,18%.

Gambar 3.4
Perbandingan Inflasi Kab.Kobar, Prov.Kalteng dan Nasional
2008-2017



Sumber: BPS, dianalisis, 2018

Komoditi yang paling sering memicu inflasi adalah komoditi pertanian, yaitu daging ayam ras, bawang putih, bawang merah dan cabai rawit. Hal ini menunjukkan komoditi pertanian secara umum memberikan andil besar sebagai pembentuk inflasi, dimana kemampuan produksi komoditi tersebut belum mampu mencukupi permintaan pasar, sehingga kebutuhan masyarakat harus dipenuhi dengan mendatangkan komoditi dari luar daerah. Kondisi demikian seyogyanya dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengarahkan kebijakan pembangunan untuk memperbaiki kinerja sektor pertaian arti luas, utamanya pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, yang komoditasnya sering muncul sebagai pemicu inflasi. Pada 2018, selain komoditi pertanian, inflasi selanjutnya diperkirakan dapat dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai diberlakukan pada 1 Juli 2018.

3.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Dengan memperhatikan kinerja perekonomian daerah periode sebelumnya dan perkiraan kinerja perekonomian daerah ke depan, maka kebijakan pengembangan sektorekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018diarahkan untuk:

1. *Pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktivitas dan produktivitas ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat;*

Percepatan penyediaan infrastruktur dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan penyediaan infrastruktur diutamakan pada infrastruktur dasar berupa prasarana untuk peningkatan aksesibilitas wilayah, kelistrikan dan lahan pertanian. Selain membuka keterisolasian wilayah, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam upaya percepatan pengentasan desa tertinggal pemerintah daerah akan meningkatkan peran dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan melalui program pemberdayaan masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan dana desa.

2. *Melaksanakan Program terpadu bidang pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, nelayan dan peternak;*

3. *Mempersiapkan pengembangan sektor industri pengolahan (pengembangan aspek hilir produk pertanian) dan perdagangan sebagai lokomotif ekonomi baru selain pertanian dalam arti luas;*

Untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, pemerintah akan mendorong pengembangan hilirisasi melalui diversifikasi produk. Sementara untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk, dilakukan standarisasi produk dan proses produksi.

4. *Mempersiapkan pengembangan kawasan berdasarkan sektor unggulan dan potensi masing-masing;*

Dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan maka didorong percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah pengembangan, pengembangan kawasan-kawasan khusus seperti pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan, pengembangan sentra-sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial, percepatan pembangunan pertanian melalui peningkatan produksi pangan, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat serta memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat, pengembangan produk unggulan (*core business* daerah) yang meliputi: agribisnis (CPO, kerupuk amplang, daging sapi),

industri manufaktur dan pariwisata (ekowisata, agrowisata dan wisata budaya).

5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, melakukan regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

Investasi di daerah diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang bermuara pada meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), memberikan kepastian hukum dan pemberian insentif bagi investor.

Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah dan daya beli masyarakat, dilakukan upaya pengendalian komoditas pemicu inflasi, seperti: daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, ikan air tawar, beras yang sebenarnya telah dapat diproduksi di tingkat lokal meskipun dengan skala yang terbatas. Pengendalian komoditas lokal dan yang berasal dari luar daerah dilakukan meliputi proses produksi, produktifitas dan pendistribusiannya. Selain itu pemerintah daerah juga mendorong pengembangan komoditas lokal, dengan dukungan strategi lainnya, seperti strategi pengembangan kawasan dan demplot komoditas pemicu inflasi, pembinaan UMKM, mempermudah akses permodalan dan jaringan pemasaran.

Dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat, pemerintah daerah melakukan upaya pengembangan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan bantuan untuk permodalan bergulir, pengembangan lembaga penjaminan untuk usaha kecil dan menengah, pengembangan lembaga-lembaga ekonomi mikro di pedesaan, fasilitasi dan pembinaan manajemen Koperasi dan UMKM serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya yang memberikan *multiplier effect* terhadap pendapatan masyarakat.

6. Peningkatan kualitas dan kualifikasi SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berupa peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia. Hal ini sebagai upaya menjamin ketersediaan tenaga kerja terampil.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas

umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. sumber pendapatan daerah Kabupaten terdiri atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi: dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. 3) pendapatan daerah yang sah, meliputi: pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dan sumbangan pihak ketiga.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM;; Potensi yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan Daerah adalah dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Pemerintah Pusat.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 diarahkan pada optimalisasi penerimaan PAD, dengan melakukan diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Melakukan upaya penegakan perda pajak daerah dan retribusi daerah melalui Tim Yustisi dengan bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan.
- 3) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah dan retribusi daerah
- 4) Diversifikasi sumber pendapatan daerah;
- 5) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber -sumber

- pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ketiga;
- 6) Meningkatkan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil;
 - 7) Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - 8) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
 - 9) Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
 - 10) Meningkatkan pendataan terkait sumber daya alam sebagai salah satu komponen perhitungan dana perimbangan daerah;
 - 11) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah.
 - 12) Penguatan Local Taxing Power dengan strategi Memperluas Basis Pungutan Dan Diskresi Penetapan Tarif.
 - 13) Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam hal menunaikan kewajibannya selaku wajib pajak.
 - 14) Dalam Bidang Dana Perimbangan dititikberatkan pada peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Pusat khususnya yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah. Perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2016 dan 2017 dan target pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada kurun waktu Tahun 2018 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.13 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2016-2018

No. Urut	Uraian	Realisasi		TARGET
				APBD Perubahan
		2016	2017	2018
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	143.330.741.728,12	176.855.124.641,39	192.238.426.000,00
4.1.1	Pajak Daerah	33.359.659.422,17	48.280.750.268,53	63.180.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	14.203.971.989,00	12.424.399.638,00	17.717.516.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.050.925.491,34	8.110.575.146,38	9.403.500.000,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	88.716.184.825,61	108.039.399.588,48	101.937.410.000,00
4.2	Dana Perimbangan	999.504.184.473,00	938.379.875.488,00	895.502.667.003,00
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	75.757.165.453,00	56.433.629.483,00	69.718.328.000,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	662.249.343.000,00	652.906.913.000,00	652.906.913.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	261.497.676.020,00	229.039.333.005,00	172.877.426.003,00
4.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	143.410.842.815,31	202.027.615.367,28	206.045.042.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	4.983.000.000,00	3.588.000.000,00	38.179.800.000,00
4.3.3	DBH Pajak dari Provinsi	64.476.297.693,31	68.899.707.882,28	70.725.351.000,00
4.3.4	Dana Penyesuaian	58.634.768.000,00	120.744.072.600,00	83.595.758.000,00
4.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	15.316.777.122,00	8.795.834.885,00	13.544.133.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.286.245.769.016,43	1.317.262.615.496,67	1.293.786.135.003,00

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2018 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 menggunakan prinsip *money follow programme*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan (ADD), tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah).

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan, sebagaimana telah direncanakan dalam Rencana Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat serta dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja

daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari urusan wajib Dasar, Urusan Wajib Non Dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, Alokasi Dana Desa dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;

Secara umum, kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan dengan mengupayakan 20% anggaran pendidikan sesuai dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yaitu 10% anggaran Kesehatan yang terdiri dari 1/3 untuk upaya kuratif, dan 2/3 untuk upaya preventif dan Perpres nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
3. Mendorong terselenggaranya pembangunan desa yang melalui Program terpadu *dan holistik* melalui program-program pro rakyat yang menstimulasi aktifitas ekonomi rakyat dengan mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya masyarakat perdesaan serta peningkatan alokasi dana desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
4. Memperbesar kemampuan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang diimbangi dengan keberpihakan pada masyarakat miskin;

II. Aspek Pelayanan Publik

1. Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Peningkatan kedaulatan pangan masyarakat yang berbasis pada pengembangan kegiatan agribisnis dan agroindustri yang berdaya saing, pemantapan pasar yang jelas dan *prospektif* dan mendukung percepatan kawasan/ *cluster* industri berbasis pertanian.

III. Aspek Daya Saing

1. Memantapkan infrastruktur transportasi dan energi yang mendukung percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kesenjangan wilayah/ *interisolasi*, serta sarana prasarana dasar perkotaan dan perdesaan seperti jalan darat, pelabuhan laut, pelabuhan ro-ro, pelabuhan laut dalam dan bandara bertaraf internasional;
2. Mempersiapkan SDM yang handal guna mengoptimalkan tata guna, tata kelola dan tata produksi pengelolaan sumber-sumber kehidupan masyarakat dan sumberdaya alam berperspektif pertumbuhan ekonomi rendah karbon dan reduksi bencana;
3. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi sumberdaya hayati dan kearifan budaya lokal serta teknologi informasi.
4. Mempercepat reformasi regulasi dan birokrasi meliputi tiga aspek yang menjadi pilar, yaitu: kelembagaan, tatalaksana dan SDM melalui pemerintah yang memiliki kelembagaan yang kuat, kepemimpinan yang *capable* dan *responsible*, SDM yang kompeten dan profesional, sistem yang memungkinkan *check and balances*, pemerintahan yang berdasarkan prosedur dan keteraturan serta mekanisme yang transparan dan akuntabel menuju *good governance*.
5. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kedaulatan pangan, integrasi kelapa sawit dan ternak sapi serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
6. Membuat kegiatan-kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan yang bersifat selektif dan sesuai kebutuhan masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat-alat pertanian dan lain-lain, serta

- penyaluran kredit UKM bersyarat ringan melalui pengembangan lembaga penjaminan atau melalui perbankan.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui dana ADD dan Dana Desa dalam upaya pelaksanaan kegiatan secara optimal dan tepat sasaran.
 8. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan/ Hibah harus memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif bagi kelompok berbadan hukum.
 9. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.
 10. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah guna melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah (PD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan terhadap Belanja Tidak Langsung pada RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai diarahkan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah pegawai (gaji pokok dan tunjangan), serta pengalokasian anggaran untuk tambahan penghasilan PNS.

2) Belanja Hibah

Kebijakan pemberian hibah dilakukan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah, semi pemerintah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan atas usulan.

3) Belanja Sosial

Kebijakan pemberian belanja bantuan sosial diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Bantuan sosial dapat diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

4) Belanja Bagi Hasil

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 10% kepada Pemerintah Desa.

5) Belanja Bantuan Keuangan

Kebijakan penganggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan diluar DAK bersifat umum yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2018 dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.14 Realisasi dan Proyeksi /Target Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 - 2018

NO	Uraian	Realisasi		APBD Perubahan	Proyeksi
		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	
5	BELANJA DAERAH				
5.1	Belanja Tidak Langsung	614.924.788.000,00	571.736.983.219,00	619.059.543.661,00	709.406.664.000,00
5.1.1	Belanja pegawai	429.310.474.848,00	402.416.578.934,00	454.904.761.060470.5 84.816.200,00	519.487.089.000,00
5.1.2	Belanja bunga	858.680.569,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
5.1.3	Belanja subsidi	0,00	0,00	0,00	0
5.1.4	Belanja hibah	19.840.520.000,00	22.678.514.612,00	7.898.680.000,00	15.000.000.000,00
5.1.5	Belanja bantuan sosial	354.550.000,00	1.517.250.000,00	2.448.000.000,00	3.448.000.000,00
5.1.6	Belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa	1.980.543.000,00	6.859.967.500,00	7.563.231.800,00	8.374.982.000,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	125.252.605.309,00	138.256.386.658,00	139.156.313.000,00	156.596.593.000,00
5.1.8	Belanja tidak terduga	117.613.913,00	8.285.515,00	2.500.000.000,00	5.000.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	667.486.100.068,64	719.644.220.971,40	697.369.805.000,00	858.000.000.000,00
2.2.1	Belanja Pegawai	81.474.081.069,00	59.160.266.682,00	123.534.865.894,80	128.700.000.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	207.296.797.293,56	257.162.837.710,85	261.239.352.188,20	274.560.000.000,00
2.2.3	Belanja Modal	378.715.221.706,08	403.321.116.578,55	312.595.586.917,00	454.740.000.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.245.201.087.707,64	1.291.381.204.190,40	1.327.520.846.000,00	1.567.406.664.000,00

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kebijakan penerimaan pembiayaan Nihil, hal ini memperhatikan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan 2018.

Kebijakan atas pengeluaran pembiayaan digunakan untuk :

- a. Penyertaan modal pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, PDAM Tirta Arut dan Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera dengan total alokasi untuk penyertaan modal / investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp. 10.500.000.000,00;
- b. Pembayaran Pokok Pinjaman Tahun 2018 sebesar Rp. 20.000.000.000,00.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun karena RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat sudah berakhir dan daerah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017, maka penyusunan RKPD tahun 2018 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 pasal 8 ayat (1), Penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada: (a) arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, Program Prioritas Nasional dalam RKP serta Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan memperhatikan visi, misi serta program kepala daerah terpilih dan (b) Peraturan Daerah Mengenai Organisasi Perangkat Daerah.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan sebagai daya ungkit kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan tahun 2018 dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJPD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Perubahan tahun 2018, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Pada bagian ini dirumuskan:

1. Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:
 - a. Korelasi terhadap pencapaian Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Nasional (Nawacita), seperti terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs), Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja.
 - b. Korelasi terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
 - c. Korelasi terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.

- d. Korelasi terhadap isu strategis daerah.
2. Prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana sebagai arahan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana.
3. Untuk masing-masing prioritas pembangunan, selanjutnya dirumuskan sasaran yang hendak dicapai dan fokus/agenda pokok, nama program, PD pelaksana serta rincian indikasi kegiatan prioritas.
4. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut.
5. Untuk dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas, maka masing-masing kegiatan prioritas dilengkapi dengan tolok ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan pembiayaannya.
6. Kerangka pendanaan disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.

4.1 Visi dan Misi Pembangunan

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

”GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”

Visi ini berorientasi pada kata IKHLAS yaitu :

I : IPTEK DAN INFRASTRUKTUR

K : KETAKWAAN

H : HARMONIS

L : LANGGENG

A : AMAN

S : SEJAHTERA

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral NURANI,yaitu :

N : NASIONALIS

U : UNGGUL

R : RELIGIUS

A : AMANAH

N : NYATA

I : INSPIRATIF

Perumusan dan penjelasan terhadap visi di maksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

POKOK-POKOK VISI	PENJABARAN VISI
VISI "GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS "	
Gerakan Membangun	Terwujudnya partisipasi dan kesadaran tinggi bagi masyarakat dan pemerintah untuk berupaya bersama-sama, bersinergi harmonis membangun kabupaten kotawaringin barat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini sebagai wujud kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat melalui gerakan membangun Kabupaten Kotawaringin Barat
Kejayaan	Terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan, menuju masyarakat kabupaten yang nasionalis, religius, aman dan sejahtera, melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul dan inspiratif, dan dilaksanakan secara nyata dan bersama-sama oleh seluruh masyarakat, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat kabupaten.
Kerja nyata	Terwujudnya etos kerja pemerintah dalam membangun daerah secara nyata, inspiratif, dalam mewujudkan amanah masyarakat, menghasilkan pembangunan yang inspiratif dan berdampak nyata pada kemajuan daerah.

POKOK-POKOK VISI	PENJABARAN VISI
VISI "GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS "	
Iptek dan Infrastruktur	Terwujudnya pengembangan IPTEK dan Infrastruktur yang maju melalui peningkatan sistem akses internet, buku, akses untuk mendapatkan pendidikan yang baik, serta peningkatan sistem transportasi umum dan peningkatan sistem infrastruktur antar wilayah guna membuka peluang Kabupaten Kotawaringin Barat untuk lebih maju dan jaya
Ketakwaan	Terciptanya Ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dari moral yang baik dengan cara memiliki tindakan untuk menciptakan suasana yang agamis, tentram dan damai
Harmonis	Tercipta keberagaman masyarakat yang Harmonis melalui kesetaraan sosial, tidak menyebar fitnah dan isu SARA, tidak menimbulkan kekacauan guna menciptakan keamanan dan kenyamanan bermasyarakat
Langgeng	Terwujudnya interaksi dan pergaulan yang Langgeng melalui saling menghargai dan menghormati, berempati, dan tidak bersikap egois guna menciptakan ketentraman dan kedamaian demi terwujudnya kejayaan Kabupaten Kotawaringin Barat
Aman	Terciptanya keberadaan hidup yang Aman dengan membudayakan anti kekerasan, mengenali kerentanan Kabupaten Kotawaringin Barat, dan meningkatkan peran perangkat perlindungan masyarakat
Sejahtera	Terwujudnya kehidupan masyarakat Sejahtera, melalui penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup guna mencukupi pangan, sandang dan papan

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 yaitu "GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT

MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”. Adapun misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- Misi 1** Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
- Misi 2** Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga.
- Misi 3** Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup.
- Misi 4** Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat
- Misi 5** Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
- Misi 6** Melestarikan situs budaya, kesenian local dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1. Tujuan

Sesuai dengan Visi dan Misi tersebut diatas, bahwa wujud dari pembangunan untuk RPJMD tahap III periode 2017 - 2022 adalah : “Mengurangi disparitas antar wilayah melalui realokasi dan redistribusi sumber daya yang ada di Kotawaringin Barat” dengan tujuan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) berbasis teknologi informasi,
2. Peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan,
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia,
4. Pengembangan komoditi unggulan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan menopang perekonomian daerah,
5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah,
6. Pengembangan industri, koperasi dan UMKM serta daya saing daerah,
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana berdasarkan asas konservasi, efisien dan lestari,
8. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur wilayah,
9. Peningkatan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas,
10. Peningkatan pemahaman, kesadaran dan pengamalan agama,
11. Peningkatan pemberdayaan masyarakat,
12. Peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat,

13. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya,

14. Peningkatan pariwisata daerah.

4.2.2. Sasaran

Sasaran Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 tertuang dalam indikator kinerja yang mengacu pada indikator RPJMN 2014-2019, RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 dan visi misi kepala daerah terpilih. Sasaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Indikator Kinerja Utama Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2016	Target Capaian Tahun 2018	Ket.
1.	Pendidikan			
1.1	Pendidikan dasar			
	SD/MI			
1.1.1	Perbandingan guru dan siswa SD/MI	1:17,28	1:20	
1.1.2	Angka Partisipasi Sekolah	98,80	98,89	
1.1.3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	162,15	190,95	
	SMP/MTs			
1.1.1	Perbandingan guru dan siswa SMP/MTs	1:14,90	1:15	
1.1.2	Angka Partisipasi Sekolah	86,65	93,55	
1.1.3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	332,19	322,52	
1.3	Fasilitas Pendidikan			
1.3.1	Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	33,10	93,66	
1.3.2	Persentase SMP/MTs yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	52,80	96,59	
1.4	Angka Putus Sekolah			
1.4.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,14	0,15	
1.4.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,70	0,39	
1.5	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV			
1.5.1	Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	98	98,05	

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2016	Target Capaian Tahun 2018	Ket.
1.5.2	Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	98,50	96,75	
1.6	Angka Kelulusan			
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,92	100	
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,98	100	
1.6.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,75	100	
1.6.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	96,99	100	
2.	Kesehatan			
2.1	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	1: 963		
2.2	Rasio dokter per satuan penduduk	1:3863		
2.3	Rasio tenaga para medis per satuan penduduk	1:753	1,43	
2.4	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80	80	
2.5	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	80	89,4	
2.6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	88	98	
2.7	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	86,10	100	
2.8	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	
2.9	Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit TBC/BTA	72	99,44	
2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	
2.11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	
2.12	Cakupan Kunjungan Bayi	91,83	96,5	
2.13	Angka Kematian Bayi /1000 Kelahiran Hidup	7,0	17	
2.14	Angka Kematian Ibu /100.000 Kelahiran Hidup	194	102	
2.15	AKABA per 1000 Balita	7	7	
3.	Pekerjaan Umum			
3.1	Proporsi Panjang jalan dalam kondisi baik	892,27	0,24	
3.2	Rasio Jaringan Irigasi	88,61	0,73	

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2016	Target Capaian Tahun 2018	Ket.
3.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	97,79	96,78	
3.4	Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk	771,8	771,8	
3.5	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	7,5	6,2	
3.6	Rasio rumah layak huni	0,65	0,64	
3.7	Rasio permukiman layak huni (%)	0,99	0,99	
3.8	Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km)	2.650,00	2.600,00	
4.	Perumahan			
4.1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	72	77,00	
4.2	Rumah Tangga Bersanitasi	77,96	80,52	
4.3	Rumah Layak Huni	65	63,60	
5	Penataan Ruang			
5.1	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,096	0,12	
6.	Perencanaan Pembangunan			
6.1	Tersusunnya RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda (Dokumen)	1	1	
6.2	Tersusunnya RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (Dokumen)	1	1	
6.3	Tersusunnya RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	1	2	
6.4	Kesesuaian Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	156	70	
6.5.	Kesesuaian RKPD dengan usulan musrenbang (%)	70	70	
6.6.	Kesesuaian muatan RPJMD dengan Visi Misi Program Bupati Terpilih (%)	70	70	
6.7	Tersusunnya evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan (Dokumen)	1	1	
6.8	Tersusunnya data dan informasi pembangunandaerah (paket)	2	2	
6.9	Tersusunnya data pendukung perencanaan pembangunan daerah (bidang sarana prasarana, bidang ekonomi dan bidang kesra) (dokumen)	5	5	

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2016	Target Capaian Tahun 2018	Ket.
7.	Perhubungan			
7.1	Jumlah Bandara (Unit)	1	1	
7.2	Jumlah Dermaga Sungai (Unit)	22	4	
7.3	Jumlah Pelabuhan Laut (Unit)	4	4	
8	Lingkungan Hidup			
8.1	Persentase Penanganan sampah	96	65	
8.2	Jumlah Duta Lingkungan	2	2	
8.3	Jumlah Kader lingkungan	60	50	
8.4	Jumlah Sekolah Adhiwiyata (Sekolah)	4	4	
8.5	Pencemaran status mutu air	2	2	
8.6	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	600	600	
8.7	Penegakan Hukum Lingkungan	3	3	
9	Kependudukan dan Catatan Sipil			
9.1	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	63,70	70	
9.2	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	100	100	
9.3	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Nasional	80	80	
9.4	Persentase jumlah penduduk dengan KK Nasional	78,37	86	
9.5	Persentase jumlah penduduk yang memiliki Elektronik KTP (e-KTP)	82,67	98	
10.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
10.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	4,50	32,83	
10.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	18,06	517	
10.3	Rasio KDRT	34	15,00	
10.4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	56,67	60	
11	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
11.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3	2,5	
11.2	Rasio akseptor KB	86,65	90,98	
11.3	Cakupan peserta KB aktif (orang)	71,19	86,05	
11.4	Keluarga Pra Sejahtera dan	32,64	15	

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2016	Target Capaian Tahun 2018	Ket.
	Keluarga Sejahtera I			
12	Sosial			
12.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan Panti Rehabilitasi (unit)	21	19	
12.2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang)	2.675	25	
12.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (kasus)	1.024	30	
13	Ketenagakerjaan			
13.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	74,19	79,00	
13.2	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,16	2,10	
14	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
14.1	Persentase koperasi aktif (%)	81	89,10	
14.2	Jumlah BPR/LKM (unit)	26	24	
14.3	Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	62	64	
15	Penanaman Modal			
15.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (unit)	35	40	
15.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional			
15.2.1	- PMDN	714.448.540.000	3.500.000.000.000	
15.2.2	- PMA (US \$)	459.100.000	650.000.000	
15.3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	108.805.880.000	1.500.000.000.000	
16	Kebudayaan			
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	11	12	
16.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	3	
16.3	Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	33	36	
17	Kepemudaan dan Olahraga			
17.1	Jumlah organisasi pemuda	235	112	
17.2	Jumlah organisasi olah raga	124	84	
17.3	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	8	8	

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2016	Target Capaian Tahun 2018	Ket.
17.4	Lapangan olahraga	150	165	
18	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
18.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	10	9	
18.2	Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kel	100	90	
18.3	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	Ada	Ada	
18.4	Penegakan PERDA	Ada	Ada	
18.5	Assesmen manajerial (orang)	120	120	
20	Pangan			
20.1	Regulasi kedaulatan Pangan (Perbup)	Ada	Ada	
20.2	Ketersediaan pangan utama/pokok (%)	30		
20.3	Diversifikasi pangan pangan (%)			
20.4	Desa mandiri pangan (desa)	100	100	
21	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
21.1	Jumlah desa yang diperbaharui profil desanya	77	94	
21.2	Jumlah Musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	94	94	
21.3	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong masyarakat	1	1	
21.4	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yg Terlatih	0	188	
21.5	Jumlah Desa/Kelurahan yg mendapat akses TTG	1	1	
21.6	Jumlah desa tertinggal	9	6	
22	Statistik			
22.1	Buku "Kotawaringin Barat Dalam Angka"	Ada	Ada	
22.2	Buku "PDRB Kotawaringin Barat"	Ada	Ada	
23	Kearsipan			
23.1	Pengelolaan arsip secara baku	Ada	Ada	
24	Komunikasi dan Informatika			

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2016	Target Capaian Tahun 2018	Ket.
24.1	Jumlah surat kabar nasional/lokal	5	10	
24.2	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	4	6	
24.3	Website milik pemerintah daerah (buah)	16	37	
24.4	Pameran/expo	Ada	Ada	
25	Perpustakaan			
25.1	Jumlah Perpustakaan	343	122	
25.1.1	Anggota	8.732	1.997	
25.1.2	Pengunjung	93.737	68.843	
25.1.3	Peminjam	73.393	37.697	
25.1.4	Jumlah koleksi bahan pustaka(eksemplar)	21.799	3.999	
II	Pelayanan Urusan Pilihan			
1.	Pertanian dan Peternakan			
1.1.	<i>Luas tanam tanaman pangan</i>			
1.1.1.	Padi sawah (Ha)	4.209	8.453	
1.1.2.	Padi ladang (Ha)	746	3.881	
1.1.3	Jagung (Ha)	2.438	1.678	
1.2.	<i>Luas Panen Tanaman Pangan</i>			
1.2.1	Padi sawah (Ha)	4.731	8.030	
1.2.2	Padi ladang (Ha)	1.296	3.687	
1.2.3	Jagung (Ha)	1.171	1.399	
1.3	<i>Produktivitas tanaman pangan</i>			
1.3.1	Padi sawah (Ton/Ha)	3,63	3,79	
1.3.2	Padi ladang (Ton/Ha)	2,05	2,50	
1.3.3	Jagung (Ton/Hektar)	3,73	3.63	
1.4	<i>Produksi tanaman pangan</i>			
1.4.1	Padi sawah (Ton)	17.174	30.435	
1.4.2	Padi ladang (Ton)	2.657	7.816	
1.4.3	Jagung (Ton)	4.368		
1.5	<i>Populasi Ternak</i>			
1.5.1	Sapi (ekor)	17.203	18.726	
1.5.2	Kerbau (ekor)	0	0	
1.5.3	Kambing /Domba(ekor)	2.538	3,040	
1.5.4	Babi (ekor)	5.881	6.178	
1.5.5	Ayam buras (ekor)	346.843	451,038	
1.5.6	Ayam ras petelur (ekor)	50.794	51.150	
1.5.7	Ayam ras pedaging (ekor)	210.115	224.984	
1.5.8	Itik (ekor)	42.574		
1.6	<i>Produksi Daging Ternak</i>			
1.6.1	Sapi (ekor)	625.860	694,99	
1.6.2	Kerbau (Ton)	0,00	0,00	
1.6.3	Kambing / Domba(Ton)	33,02	63,95	
1.6.4	Babi (Ton)	86,56	115,14	
1.6.5	Ayam buras (Ton)	400.60	433.95	
1.6.6	Ayam Ras Petelur (Ton)	0,00	0,00	

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2016	Target Capaian Tahun 2018	Ket.
1.6.7	Ayam Ras Pedaging (Ton)	1.031,75	892,1	
1.6.8	Itik (Ton)	17.09	15.14	
1.7	Produksi Telur			
1.7.1	Ayam buras(Ton)	212,71	281.84	
1.7.2	Ayam Ras Petelur (Ton)	366,36	230,17	
1.7.3	Itik(Ton)	176,97	161.17	
1.8	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	3,85	3,80	
1.9	Kontribusi Sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	4,78	4,68	
2	Perkebunan			
2.1	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	21,61	37	
2.2	ekspor per tahun dari komoditas perkebunan (US\$)	189.439,16	199.182,20	
2.3	Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)	55.160	79.820	
2.4	Jumlah Industri pengolahan turunan CPO	15	1	
2.5	Sumbangan sektor perkebunan terhadap PAD (Milyar Rupiah)	12.447.807.384	13.000.000.000	
2.6	Kemitraan/Plasma	28.785,91	31.663	
2.7	Pengembangan/perluasan areal perkebunan	212.426,46		
2.7.1	Karet	14.560,30	18.284	
2.7.2	Kelapa sawit	196.541,30	204.909	
2.7.3	Kelapa	738,75	1.205	
2.7.4	Lada	318,60	1.042	
2.8	Produksi komoditi perkebunan			
2.8.1	Karet (lump)	7.253,83	15.600	
2.8.2	Kelapa (kopra)	265,45	347	
2.8.3	Kelapa Sawit (Tbs)	2.974.134,28	4.550.000	
2.8.4	Lada (putih/hitam)	156,49	432	
3.	Kehutanan			
3.1	Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	25	170.57	
4.	Pariwisata			
4.1	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)	80.696	69.609	
4.2	Jumlah Destinasi wisata (obyek)	14	15	
4.3	Jumlah devisa (Rp)			
4.4	Jumlah even tahunan wisata daerah (kegiatan)	6		
5.	Perikanan			
5.1	Produksi perikanan (ton)	19.922,39	17.661,82	

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2016	Target Capaian Tahun 2018	Ket.
5.2	Perikanan tangkap (ton)	14.792,70	13.000	
5.3	Perikanan Budi daya (ton)	5.129,69	4.550,00	
5.4	Konsumsi ikan perkapita (Kg)	43,50	45,48	
5.5	Peningkatan produksi benih ikan (juta ekor)	1.577.193	2,000	
5.6	Peningkatan produksi perikanan budidaya(ton)	518,66	589,00	
5.7	Penurunan <i>illegal fishing</i> (kasus)	6		
6.	Perdagangan			
6.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	18	17,5	
6.2	Ekspor bersih perdagangan (US \$)	400.000	390.000	
6.3	Pasar daerah (unit)			
6.4	Penanganan sengketa konsumen (kasus)	-		
6.5	Alat ukur yang ditera ulang (unit)	-		
7.	Perindustrian			
7.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	25,30		
7.2	Pertumbuhan industri kecil dan menengah (%)	17	10	
7.3	Pembinaan pengrajin (Kelompok)	0		

4.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018.

4.3.1 Tema dan Strategi

4.3.1.1. Tema

Dengan memperhatikan tujuan pembangunan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025, maka tema pembangunan daerah tahun 2018 adalah “Pemantapan Infrastruktur Untuk Mengurangi Disparitas Antar Wilayah di Kotawaringin Barat”. Selanjutnya, penjelasan dari tema tersebut dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) program utama yaitu :

- a. Pemantapan dan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi disparitas dan mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup,
- b. Pembangunan bidang pertanian dalam arti luas dengan menitikberatkan pada sub sektor perkebunan,
- c. Pembangunan bidang pariwisata yang berbasis pada pelestarian situs budaya,

kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

Selain 3 (tiga) program utama juga dilaksanakan pembangunan pada bidang lainnya baik urusan pemerintahan wajib (terkait dan tidak terkait pelayanan dasar) dan urusan pemerintahan pilihan.

4.3.1.2. Strategi

Mengacu pada evaluasi pembangunan tahun 2016 serta perkiraan pelaksanaan pembangunan tahun 2017, maka permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2018 dijabarkan dalam bentuk isu strategis daerah sebagaimana berikut :

a. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur

Meskipun secara umum pembangunan infrastruktur sudah memadai, namun pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan pemerataan dan kualitas pembangunannya agar dapat dirasakan hasilnya oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke daerah pelosok. Kebijakan diarahkan pada pengembangan infrastruktur wilayah secara berkeadilan dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daya dukung pusat-pusat pertumbuhan seperti Kawasan Industri, Kawasan *Agropolitan dan Kawasan Minapolitan* perlu lebih ditingkatkan sehingga akan terlihat nyata manfaatnya.

b. Kualitas layanan dan aksesibilitas Layanan Dasar

Dalam bidang kesehatan, kebijakan diarahkan pada upaya peningkatan cakupan pelayanan kesehatan secara proporsional dan berkeadilan. Saat ini aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan belum berjalan secara optimal. Oleh karenanya pemerintah senantiasa berupaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, menjangkau seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin dengan meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas puskesmas dan mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat serta sanitasi yang layak. Dalam bidang pendidikan, kebijakan diarahkan pada peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan dalam rangka pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berupaya mewujudkan dan menjamin pemerataan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

c. Penanggulangan Kemiskinan dan masalah sosial lainnya

Untuk tahun ini, kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penguatan sinergi program-program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pemerintah mencoba untuk memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk anak-anak terlantar, fakir miskin, lansia,

penyanggah cacat dan masyarakat miskin. Kebijakan pengembangan manajemen penanggulangan bencana diharapkan akan lebih efektif dengan keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sementara itu, dalam hal perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.

d. Pengembangan agribisnis dan kedaulatan pangan

Dalam bidang ini, kebijakan diarahkan pada peningkatan sinergitas agribisnis dan ketahanan pangan lintas sektor. Langkah yang diambil yaitu meningkatkan pemberdayaan petani dan kelembagaan pendukungnya, meningkatkan produktivitas, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, meningkatkan pengembangan agroindustri dan agrobisnis untuk memberdayakan perekonomian rakyat, serta meningkatkan pengamanan kedaulatan pangan.

e. Peningkatan daya beli masyarakat.

Pada periode ini, Kabupaten Kotawaringin Barat ingin mencapai kemandirian dengan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, maupun daerah lain. Oleh karenanya pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mencapai kemandirian itu. Kebijakan diarahkan dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

f. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stakeholder, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat menuju pada keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Kemajuan suatu daerah ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai kemajuan itu, kebijakan diarahkan pada upaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai pemerataan hasil pembangunan.

g. Penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup

Dalam hal ini, permasalahan yang dihadapi adalah pada pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung capaian ketahanan pangan, pengendalian bencana dan kawasan lindung. Pada akhirnya diharapkan akan terwujud keserasian pemanfaatan ruang dan pendayagunaan tanah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup.

h. Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik

Kinerja aparatur dalam melayani masyarakat selalu menjadi sorotan dimasa

sekarang ini. Untuk itu kebijakan diarahkan pada upaya mewujudkan kualitas dan kapasitas aparatur yang profesional dan peningkatan pelayanan publik. Upaya yang dilakukan antara lain dengan mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima. Kearifan lokal berbasis sumber daya lokal yang dikembangkan dengan optimal akan menjadi modal dalam membangun Kotawaringin Barat. Sumber daya lokal dimaksud antara lain adalah potensi usaha pertanian dan perkebunan, potensi sumber daya alam serta potensi sistem sosial budaya masyarakat.

4.3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan daerah dirumuskan dalam prioritas pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah tersebut terdiri dari kebijakan dan program pembangunan.

Dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka terdapat beberapa prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 menyangkut aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek pemerintahan, aspek fisik dan prasarana wilayah.

Berdasarkan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022, berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2018, sehingga prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 ditetapkan sebagaimana Tabel 4.2. berikut:

Tabel 4.2.
Rekapitulasi Program Prioritas SKPD Tahun 2018

NO.	PROGRAM UMUM
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

	PROGRAM PRIORITAS
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini
2.	Program Pendidikan Sekolah Dasar
3.	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
4.	Program Pendidikan Non Formal
5.	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
6.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
7.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
8.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
9.	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
10.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
11.	Program Pengawasan Obat Dan Makanan
12.	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
13.	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
14.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
15.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
16.	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
17.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
18.	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
19.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
20.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
21.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
22.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
23.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
24.	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
25.	Program Pendayagunaan, Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
27.	Program Pengadaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit
28.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
29.	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
30.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
31.	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
32.	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan

33.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
34.	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
35.	Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumberdaya Lainnya
36.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
37.	Program Pengendalian Banjir
38.	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
39.	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman
40.	Program Pembinaan Konstruksi
41.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
42.	Program Pengembangan Perumahan
43.	Program Pembangunan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
44.	Program Perencanaan, Penataan Dan Pengendalian Penggunaan Tanah Perumahan Dan Kawasan Permukiman
45.	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
46.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
47.	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
48.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
49.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
50.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
51.	Program Pendidikan Politik Masyarakat
52.	Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Dan Lembaga Kemasyarakatan
53.	Program Pencegahan Dini Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
54.	Program Tanggap Darurat
55.	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
56.	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
57.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
58.	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi
59.	Program Pembinaan Anak Terlantar
60.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
61.	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
62.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

63.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
64.	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
65.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
66.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
67.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
68.	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
69.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
70.	Program Pengembangan Kabupaten Layak Anak
71.	Program Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak
72.	Program Keluarga Berencana
73.	Program Pelayanan Kontrasepsi
74.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
75.	Program Pengendalian Penduduk
76.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
77.	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan
78.	Program Pengembangan Sistem Distribusi Dan Cadangan Pangan
79.	Program Pengembangan Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan
80.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
81.	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
82.	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
83.	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
84.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi
85.	Program Pengendalian Kebakaran Hutan
86.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)
87.	Program Pengawasan Penataan Pemegang Perijinan Lingkungan Hidup
88.	Program Peningkatan Kapasitas Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
89.	Program Penanganan Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
90.	Program Penanaman Pohon Pada Lahan Di Luar Kawasan
91.	Program Penataan Administrasi Kependudukan
92.	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
93.	Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat, Masyarakat Miskin Dan Desa Tertinggal

94.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
94.	Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna
95.	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
96.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
97.	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
98.	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
99.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
100.	Program Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah
102.	Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
103.	Program Pengembangan Infrastruktur, Komunikasi Dan Informatika
104.	Program Implementasi Dan Pengembangan Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah E-Government
104.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
105.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
106.	Program Pengembangan Usaha Koperasi
107.	Program Penumbuhan Wirausaha Baru
108.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Mikro
109.	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
110.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor
111.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
112.	Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan
113.	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
114.	Program Pembinaan Dan Pengelolaan Pasar
115.	Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai
116.	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
117.	Program Pengembangan Sentra Dan Klaster Industri
118.	Program Perlindungan HKI Dan Standardisasi Industri
119.	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
120.	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi
121.	Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
122.	Program Pengawasan Dan Pengendalian Penanaman Modal
123.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
124.	Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
125.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

126.	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan
127.	Program Pengelolaan Arsip Statis Dan Dinamis
128.	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
129.	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan
130.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
131.	Program Pengembangan Usaha Hasil Perikanan
132.	Program Pengembangan Perikanan
133.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
134.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
135.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
136.	Program Pengembangan Kemitraan
137.	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
138.	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan
139.	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
140.	Program Peningkatan Produksi Hortikultura
141.	Program Peningkatan Produksi Perkebunan
142.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Penyuluhan Pertanian
143.	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
144.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
145.	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
146.	Program Peningkatan Prasarana Dan Sarana Peternakan Dan Kesehatan Hewan
147.	Program Pembinaan Kemasyarakatan
148.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
149.	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa
150.	Program Penyebaran Informasi Dan Dokumentasi
151.	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
152.	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
153.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan
154.	Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan
155.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
156.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
157.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

158.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
159.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
160.	Program Pembinaan Dan Pelayanan Hukum
162.	Program Peningkatan Kesadaran Dan Pemahaman Hak Asasi Manusia
163.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi
164.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dan Instansi Pemerintahan
165.	Program Peningkatan Dan Pengelolaan Aset Kesekretariatan Daerah
166.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
167.	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan
168.	Program Penyusunan Kebijakan Dan Administrasi Pembangunan
168.	Program Pengembangan Data/Informasi Bidang Pengadaan
169.	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
170.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
171.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
172.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
173.	Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
174.	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
175.	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
176.	Program Penelitian Dan Perencanaan Pembangunan Daerah
177.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
178.	Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah Dan Lingkungan Hidup
179.	Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
180.	Program Perencanaan Sosial Dan Pemerintahan
181.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
182.	Program Ekstensifikasi Pajak Daerah
183.	Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Pelayanan Keluhan Masyarakat
184.	Program Intensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Asli Daerah
185.	Program Peningkatan Penerimaan Dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
186.	Program Pengembangan Karir
187.	Program Peningkatan Kinerja Aparatur
188.	Program Pembinaan Aparatur

4.3.3. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi dan Kabupaten Tahun 2018

Pembangunan dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hasil kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pememrintah kabupaten. Oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi antara prioritas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Sinkronisasi prioritas pembangunan ini dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel. 4.3.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten tahun 2018

No	Program Prioritas Nasional (Nawacita)	No	Program Prioritas Provinsi	No	Program Prioritas Kabupaten
I	PENDIDIKAN				
1	Pendidikan Vokasi				
2	Peningkatan kualitas guru				
II	KESEHATAN				
3	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	7	Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	3	Peningkatan kualitas sumber daya manusia
4	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit				
5	Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)				
III	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
6	Penyediaan Perumahan Layak	2	Pemerataan infrastruktur wilayah	8	Peningkatan dan pemerataan infrastruktur wilayah,
7	Air Bersih dan Sanitasi				
IV	PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA				
8	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)	8	Pengelolaan industri pariwisata	14	Peningkatan pariwisata daerah.
				13	Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya,
9	Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)	10	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD	5	Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah,
10	Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)				
11	Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja				
12	Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi				

V	KETAHANAN ENERGI				
13	EBT dan Konservasi Energi	9	Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan		
14	Pemenuhan Kebutuhan Energi				
VI	KETAHANAN PANGAN				
15	Peningkatan Produksi pangan	4	Stabilitas ekonomi daerah		Pengembangan komoditi unggulan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan menopang perekonomian daerah,
16	Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)				
VII	PENANGGULANGAN KEMISKINAN				
17	Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran	5	Peningkatan pendapatan masyarakat	6	Pengembangan industri, koperasi dan UMKM serta daya saing daerah,
18	Pemenuhan Kebutuhan Dasar				
19	Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi				
VIII	INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN				
20	Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)	1	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah	9	Peningkatan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas
21	Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika	2	Pemerataan infrastruktur wilayah		
IX	PEMBANGUNAN WILAYAH				
22	Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal	3	Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai	7	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana berdasarkan asas konservasi, efisien dan lestari,
23	Pembangunan Perdesaan				
24	Reforma Agraria				
25	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)				
26	Percepatan Pembangunan Papua				

X	POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN	6	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi	1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berbasis teknologi informasi,
27	Penguatan Pertahanan			2	Peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan
28	Stabilitas Politik dan Keamanan			11	Peningkatan pemberdayaan masyarakat,
29	Kepastian Hukum			12	Peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat
30	Reformasi Birokrasi				Peningkatan pemahaman, kesadaran dan pengamalan agama

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018. Berdasarkan prioritas pembangunan yang dijabarkan pada 33 urusan yang terdiri atas :

- a). 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan dasar, yaitu :
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan
 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 6. Sosial
- b). 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, yaitu:
 1. Tenaga kerja
 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 3. Pangan
 4. Pertanahan
 5. Lingkungan Hidup
 6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 9. Perhubungan
 10. Komunikasi dan Informatika
 11. Koperasi Usaha Kecil Menengah
 12. Penanaman Modal Daerah
 13. Kepemudaan dan Olah Raga
 14. Statistik
 15. Persandian
 16. Kebudayaan
 17. Perpustakaan
 18. Kearsipan
- c). 8 (delapan) Urusan pemerintah pilihan, yaitu :
 1. Kelautan dan Perikanan;
 2. Pariwisata;

3. Pertanian;
 4. Kehutanan
 5. Energi dan Sumberdaya Mineral;
 6. Perdagangan;
 7. Perindustrian
 8. Transmigrasi.
- d). 5 (lima) fungsi penunjang urusan, yaitu :
1. Perencana
 2. Keuangan
 3. Kepegawaian serta Diklat
 4. Litbang

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018. Rincian Program dan Rincian Rencana Kerja setiap PD Tahun Anggaran 2018 terlampir.

Tabel. 5.1.
Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Langsung Perubahan PD Tahun 2018

No.	PERANGKAT DAERAH	PAGU BELANJA LANGSUNG (Rp)	KET
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83.213.373.000	
2.	Dinas Kesehatan	71.344.770.744	
3.	RSUD Sultan Imanuddin	124.588.488.000	
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	223.509.350.000	
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.156.821.000	
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.339.271.000	
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.606.642.000	
9.	Dinas Sosial	2.637.024.000	
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.677.641.000	
11.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	4.260.215.000	
12.	Dinas Ketahanan Pangan	1.645.853.000	

No.	PERANGKAT DAERAH	PAGU BELANJA LANGSUNG (Rp)	KET
13.	Dinas Lingkungan Hidup	15.814.865.000	
14.	Dinas Kependudukan dan Capil	2.118.593.000	
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.417.787.000	
16.	Dinas Perhubungan	9.327.372.000	
17.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.278.378.000	
18.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.339.005.800	
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.514.224.000	
20.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	7.454.586.000	
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.684.228.000	
22.	Dinas Perikanan	10.813.947.000	
23.	Dinas Pariwisata	8.117.031.000	
24.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	11.383.654.000	
25.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.360.478.366	
26.	Sekretariat Daerah	40.935.574.000	
27.	Sekretariat DPRD	10.654.750.000	
28.	Inspektorat	3.546.819.000	
29.	Kecamatan Arut Selatan	2.608.654.650	
30.	Kecamatan Arut Utara	941.880.000	
31.	Kecamatan Kumai	1.677.641.000	
32.	Kecamatan Kotawaringin Lama	3.113.500.000	
33.	Kecamatan Pangkalan Lada	847.940.200	
34.	Kecamatan Pangkalan Banteng	719.113.000	
35.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.255.070.000	
36.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.753.777.000	
37.	Badan Pendapatan Daerah	5.427.168.000	
38.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan	4.781.694.000	
	JUMLAH	714.867.178.760	

BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Subtansi Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 ini, merupakan hasil sinkronisasi antar pelaku kepentingan dan stakeholder, baik ditingkat Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi dan Nasional dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang faktual dihadapi.

Kedisiplinan dan komitmen sangat menentukan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan hasil perencanaan tahunan ini, dengan demikian diperintahkan kepada seluruh perangkat daerah agar :

1. Komitemen seluruh SKPD untuk memanfaatkan sistem perencanaan, penggaran dan pelaporan yang terintegrasi guna menunjang akuntabilitas perencanaan daerah.
2. Melaksanakan program terpadu antar sektor dan pelaksanaan kegiatan secara disiplin untuk menghasilkan sasaran yang direncanakan.
3. Mendokumentasikan dan mengkaji hasil pelaksanaannya ditingkat SKPD untuk kemudian melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan secara lengkap sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja serta kemanfaatannya bagi masyarakat.
4. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait sehingga program dan kegiatan konsisten secara vertikal dan horizontal.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

NURHIDAYAH